



**Pemerintah
Kota Samarinda**

LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

**Dinas Perhubungan
Kota Samarinda**



 **DISHUB
SAMARINDA**
Bergerak Menuju Kota Peradaban



KATA PENGANTAR

Nomor : 500.11.1/190/100.05

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 ini. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan publik.

Penyusunan laporan kinerja Dinas Perhubungan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP 2025 ini bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan dan akuntabel mengenai kinerja instansi kami selama tahun anggaran yang telah berlalu. Dalam laporan ini, kami menyajikan berbagai data dan analisis yang mencerminkan pencapaian, tantangan, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilai kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Perhubungan. Kinerja Dinas Perhubungan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama semua pihak, baik dari internal instansi maupun eksternal. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKJIP ini.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi alat evaluasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja instansi di masa yang akan datang, serta sebagai acuan bagi pengambilan keputusan yang lebih baik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akhir kata, kami berharap LKjIP 2025 ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Samarinda, 25 Februari 2026

Kepala Dinas Perhubungan



HMT, MANALU, S.SiT, M.Sc

NIP. 19770328 200012 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang terbentuk berdasarkan Perda Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2001, merupakan salah satu instansi teknis di mana dalam melaksanakan tugasnya langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga kinerja dan pelayanannya dapat langsung dirasakan oleh segala lapisan masyarakat.

Tahun 2025, Dinas Perhubungan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 yang merupakan manifestasi komitmen Dinas Perhubungan dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda merupakan suatu rencana jangka menengah, yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Tujuan Renstra Dinas Perhubungan

Tujuan yang akan dicapai Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 Kota Samarinda adalah:

“Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas”

Sasaran Renstra Dinas Perhubungan

Sasaran yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kota Samarinda selama kurun waktu 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi”

Secara umum dalam tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah mencapai target kinerja melalui 1 (Satu) Sasaran dengan 1 (Satu) indikator Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dan dokumen Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rasio Konektivitas

Rasio Konektivitas menggambarkan tingkat keterhubungan jaringan transportasi antar wilayah. Peningkatan rasio konektivitas menunjukkan semakin terintegrasinya sistem transportasi yang berdampak pada kelancaran mobilitas, efisiensi distribusi, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan transportasi.

Tingkat capaian rasio konektivitas kota Samarinda pada tahun 2025 adalah sebesar 75,77% . Dari target 57,67 (nilai) yang telah ditetapkan, terealisasi sebesar 43,7 (nilai). Ketercapaian ini dipengaruhi oleh belum terlayannya beberapa trayek yang menjadi

komponen perhitungan indikator atau faktor jumlah trayek yang dilayani belum sesuai dengan jumlah kebutuhan trayek.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025 juga didukung oleh anggaran dengan alokasi **Rp. 115.781.053.985,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 112.533.025.172,-** atau dengan capaian **97,19%**.

Adapun kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran tersebut :

- Berkurangnya minat masyarakat terhadap penggunaan jasa angkutan umum
- Perlunya peningkatan dan pembinaan kepada para pemilik pengusaha serta operator lapangan dalam peningkatan kualitas pelayanan bagi angkutan umum agar dapat berkompetisi dalam persaingan pasar yang sehat.
- Koneksitas terhadap jaringan pelayanan angkutan umum yang belum terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dengan baik sehingga berdampak pada pemborosan waktu, biaya dan kondisi lainnya.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam pengawasan teknis baik di transportasi jalan raya maupun transportasi sungai.

Berdasarkan hal-hal di atas maka Dinas perhubungan akan mengambil langkah-langkah dalam mendukung peningkatan rasio konektivitas yakni :

- Memperbaiki kondisi armada dan mengintegrasikan transportasi umum dengan moda lain (Angkutan Massal).
- Mensosialisasikan manfaat dan dampak positif angkutan massal dan mengajak *Stake Holder* untuk ikut berpartisipasi.
- Pengusulan dukungan anggaran secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pengembangan konektivitas.
- Penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya maupun swasta dalam rangka pelayanan transportasi.
- Mengembangkan kompetensi dan kualitas, efisiensi atau efektifitas dari proses kerja serta mencari dan menerapkan cara-cara (ide, solusi, metode) baru untuk meningkatkan hasil dan proses kerja.

Dengan demikian, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik, serta menjadikan laporan ini sebagai acuan untuk perbaikan yang berkelanjutan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB.I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1. Tugas Pokok.....	4
2. Fungsi.....	4
D. Struktur Organisasi.....	14
E. Sumber Daya Dinas Perhubungan.....	12
F. Isu-Isu Strategis.....	15
G. Hasil dan tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Yahun 2024.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB.II PERENCANAAN KINERJA.....	21
A. Rencana Strategis.....	21
1. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	21
2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan.....	22
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	23
1. Strategi.....	23
2. Arah Kebijakan.....	26
C. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	28
D. Perjanjian Kinerja.....	58
BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA.....	48
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	48
A.1 Capaian Kinerja.....	51
A.2 Analisis Capaian Kinerja.....	50
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	50
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun yang Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	53

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	53
4. Realisasi Kinerja Mengacu pada Standar Nasional/ Lainnya.....	54
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	57
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56
6.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia	56
6.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran	57
7. Program dan Kegiatan yang mendukung	58
A.3 Analisis Capaian Kinerja Program.....	59
B. Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	81
C. Matrik Penilaian Kinerja Organisasi (PKO).....	88
BAB.IV PENUTUP.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2022-2025.....	12
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2022 – 2025	12
Tabel 1.3	Pegawai PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu 2025	13
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2022 – 2025.....	13
Tabel 1.5	Aset Dinas Perhubungan Kota Samarinda Per 31 Desember Tahun 2025	14
Tabel 1.6	Data Sarana Operasional Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2022 – 2025.....	15
Tabel 1.7	Progres Nilai AKIP.....	16
Tabel 1.8	Tindak Lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat.....	17
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025-2029	23
Tabel 2.2	Rencana Strategis Periode Tahun 2025-2029 Dinas Perhubungan Kota Samarinda	26
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2016 untuk Dinas Perhubungan Kota Samarinda (Tabel T-C.26, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)	27
Tabel 2.4	Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Samarinda	28
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Anggaran Murni 2025.....	29
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Anggaran Perubahan 2025	30
Tabel 2.7	Pagu Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja sampai dengan APBD-P Tahun Anggaran 2024	30
Tabel 2.8	Rincian Indikator Program	31
Tabel 2.9	Keterkaitan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	32
Tabel 2.10	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	42
Tabel 2.11	Alokasi Anggaran Sasaran Strategis	47
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	49
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025.....	50
Tabel 3.3	Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2025	50
Tabel 3.4	Perhitungan IK 1 (Angkutan Jalan).....	52
Tabel 3.5	Perhitungan IK 2 (Angkutan Sungai)	52
Tabel 3.6	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.....	53

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	53
Tabel 3.8 Realisasi Kinerja Mengacu Pada Standar Nasional/Lainnya	54
Tabel 3.9 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Menurut Umur dan Jenis Kelamin	57
Tabel 3.10 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	58
Tabel 3.11 Rincian Pencapaian Indikator Program Tahun 2025	59
Tabel 3.12 Nilai AKIP Tahun 2024.....	60
Tabel 3.13 TL LHE AKIP 2024	61
Tabel 3.14 Hasil Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	63
Tabel 3.15 Data Pelayanan kebutuhan trayek angkutan jalan	64
Tabel 3.16 Data rincian kebutuhan trayek Kota Samarinda	64
Tabel 3.17 Data Trayek yang dilayani	68
Tabel 3.18 Perlengkapan jalan yang terpasang.....	70
Tabel 3.19 Persentase kendaraan layak uji.....	71
Tabel 3.20 Data pelayanan kebutuhan lintas angkutan sungai	72
Tabel 3.21 Data rincian lintas yang dilayani	72
Tabel 3.22 Analisis keberhasilan dan kegagalan program, kegiatan dan sub kegiatan	74
Tabel 3.23 Realisasi anggaran berdasarkan DPA-P tahun 2025	81
Tabel 3.24 Matrik penilaian kinerja organisasi	88

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. E-Dalev 2025
5. Dokumentasi Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan komponen yang sangat penting karena menyangkut pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas atas penggunaan anggaran. Pertanggungjawaban di instansi pusat maupun daerah harusnya menyusun dan mempublikasikan LKJIP sebagai wujud tanggung jawab dan akuntabilitasnya.

Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP tersebut kemudian diterapkan melalui pembuatan target kinerja disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah.

LAKIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan pendorong terwujudnya *Good Governance*. LAKIP bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi manfaat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sebagaimana ***Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014*** Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ***Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014*** Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Terbentuknya Dinas Perhubungan Kota Samarinda, mengalami beberapa tahap yang disebabkan terjadinya pemekaran daerah, pada tahun 1975 dibentuk instansi pemerintahan yang mengurus Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disebut DLLAJ. DLLAJ mempunyai wilayah kerja setingkat Provinsi disebut Kantor Inspeksi LLAJ Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan untuk wilayah Kota Samarinda yang mengurus bidang tersebut adalah DLLAJ Kotamadya Samarinda.

Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang terbentuk berdasarkan Perda Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2001, merupakan salah satu instansi teknis dimana dalam melaksanakan tugasnya langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga kinerja dan pelayanannya dapat langsung dirasakan oleh segala lapisan masyarakat.

Serangkaian upaya peningkatan kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas

Perhubungan selama ini mengacu pada visi, misi, tujuan kebijakan dan program dengan memperhatikan strategi dan prioritas pembangunan di Kota Samarinda. Adapun arah kebijakan Dinas Perhubungan diimplementasikan dalam program prioritas sebagai berikut:

1. Program Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).
2. Program pengelolaan pelayaran
3. Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

B. LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda tahun 2023 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 – 2026 tentang AKIP;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026;
8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda
9. Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 060.01/482/HK- KS/XII/2021 Tentang Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026.
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026.

12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026.
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tanggal 29 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023;
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 84 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023;
15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 72 Tahun 2023 tanggal tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Samarinda Tahun 2023.

C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan Kota Samarinda mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. TUGAS POKOK

1. Dinas perhubungan Kota Samarinda mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di bidang “Perhubungan” yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan Tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas Dinas Perhubungan Kota Samarinda mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang di tetapkan Pemerintah Kota.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang di tetapkan Pemerintah Kota.
3. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang di tetapkan Pemerintah Kota.

4. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas Perhubungan
5. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas.
6. Pengawasan dan Pengendalian bidang Perhubungan.
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
8. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas.
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

❖ **SEKRETARIAT**

1. TUGAS POKOK SEKRETARIAT

- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan Pengelolaan Barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- c. Sekretariat membawahi sub bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

2. FUNGSI SEKRETARIAT

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan.
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan.
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan.
- f. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
- g. Pengelolaan anggaran dinas dan penerimaan dinas/retribusi.
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai.
- i. Pelaksanaan verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan.
- j. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- k. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP),

Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

- l. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan.
- m. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sesuai tugas fungsi dinas.
- n. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- o. Pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi yang digunakan oleh lintas bidang pada dinas.
- p. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- q. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ **BIDANG LALU LINTAS JALAN**

1. TUGAS BIDANG LALU LINTAS JALAN

- a. Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Lalu Lintas Jalan.
- b. Bidang Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas

2. FUNGSI BIDANG LALU LINTAS JALAN

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang Lalu Lintas, Pengendalian dan Ketertiban, dan Perparkiran.
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Lalu Lintas, Pengendalian dan Ketertiban, dan Perparkiran.
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang Lalu Lintas, Pengendalian dan Ketertiban, dan Perparkiran.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Lalu Lintas, Pengendalian dan Ketertiban, dan Perparkiran.
- f. Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan.
- g. Pengembangan pelayanan sistem jaringan lalu lintas jalan raya dan pengelolaannya, pengendalian dan operasional.

- h. Penyiapan dan pelaksana koordinator forum lalu lintas.
- i. Penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan penetapan kinerja jalan.
- j. Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota serta koordinator pelaksanaan lomba tertib lalu lintas.
- k. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota.
- l. Pelaksanaan pungutan dan penyetoran retribusi berkaitan operasional parkir dan penderekan.
- m. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
- n. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan keharmonisan pelaksanaan pedoman dan standarisasi pengembangan sistem jaringan jalan, perekomendasi, pemantauan, perizinan penyelenggaraan dan pengoperasian dampak pembangunan sesuai norma, standar dan prosedur manajemen rekayasa lalu lintas.
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Lalu Lintas, Pengendalian dan Ketertiban, dan Perparkiran.
- p. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
- q. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

❖ **BIDANG PRASARANA**

1. TUGAS BIDANG PRASARANA

- a. Bidang Prasarana mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis prasarana dan fasilitas perhubungan.
- b. Bidang Prasarana dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas.
- c. Bidang Prasarana membawahi seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Bidang.

2. FUNGSI BIDANG PRASARANA

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Prasarana dan Fasilitas Perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda.

- b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang prasarana serta lampu penerangan jalan umum dan fasilitas perhubungan meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Prasarana dan Fasilitas Perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda.
- d. Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan teknis prasarana perhubungan serta lampu penerangan jalan umum dan pengelolaannya, pengendalian dan pemeliharaan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku.
- e. Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan serta lampu penerangan jalan umum.
- f. Pengelolaan dan pemeliharaan terminal penumpang Tipe C.
- g. Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan operasional terminal Tipe C.
- h. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan keharmonisan pelaksanaan pedoman dan standarisasi pengembangan fasilitas dan prasarana, perekomendasi, pemantauan, perizinan penyelenggaraan dan pengoperasian prasarana perhubungan.
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang prasarana dan fasilitas perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda.
- j. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
- k. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ **BIDANG KESELAMATAN**

1. TUGAS BIDANG KESELAMATAN

- a. Bidang Keselamatan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis keselamatan terhadap jasa/pelayanan perhubungan.
- b. Bidang Keselamatan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas.
- c. Bidang Keselamatan membawahi seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Bidang.

2. FUNGSI BIDANG KESELAMATAN

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Keselamatan Perhubungan meliputi Keselamatan Jalan dan Pelayaran.
- c. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang Keselamatan Perhubungan meliputi Keselamatan Jalan dan Pelayaran.
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Keselamatan Perhubungan meliputi Keselamatan Jalan dan Pelayaran.
- f. Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan teknis Keselamatan Perhubungan dan pengelolaannya, pengendalian dan pemeliharaan.
- g. Penyiapan dan pelaksanaan kegiatan Dewan Maritim Kota.
- h. Pelaksanaan penyusunan program audit, investigasi terhadap Keselamatan Perhubungan, Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan Pengujian Kelaikan Kapal.
- i. Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan Pengujian Kendaraan Bermotor dan pengukuran dan Pengujian Kelaikan Kapal.
- j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Keselamatan Perhubungan meliputi Keselamatan Jalan, Pelayaran dan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- k. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

❖ BIDANG ANGKUTAN

1. TUGAS BIDANG ANGKUTAN

- a. Bidang Angkutan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis keselamatan terhadap jasa/pelayanan perhubungan.
- b. Bidang Angkutan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas.

2. FUNGSI BIDANG ANGKUTAN

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Angkutan meliputi Angkutan Jalan, Angkutan dan Dermaga Sungai dan Angkutan Khusus.
- c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data perumusan Angkutan.
- d. Pelaksanaan kegiatan perumusan Angkutan.
- e. Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan trayek dan operasional dermaga.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait perumusan Angkutan.
- g. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data perumusan pepadu moda.
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Angkutan meliputi Angkutan Jalan, Angkutan dan Dermaga Sungai dan Angkutan Khusus.
- i. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ **UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

1. TUGAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

- a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis keselamatan terhadap jasa/pelayanan perhubungan.
- b. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas.

2. FUNGSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan UPTD.
- b. Pelayanan pemeriksaan teknis dan sertifikasi kelaikan jalan kendaraan bermotor.
- c. Pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas dan peralatan uji berkala.
- d. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait.

- e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat dan perlengkapan.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

D. STRUKTUR ORGANISASI

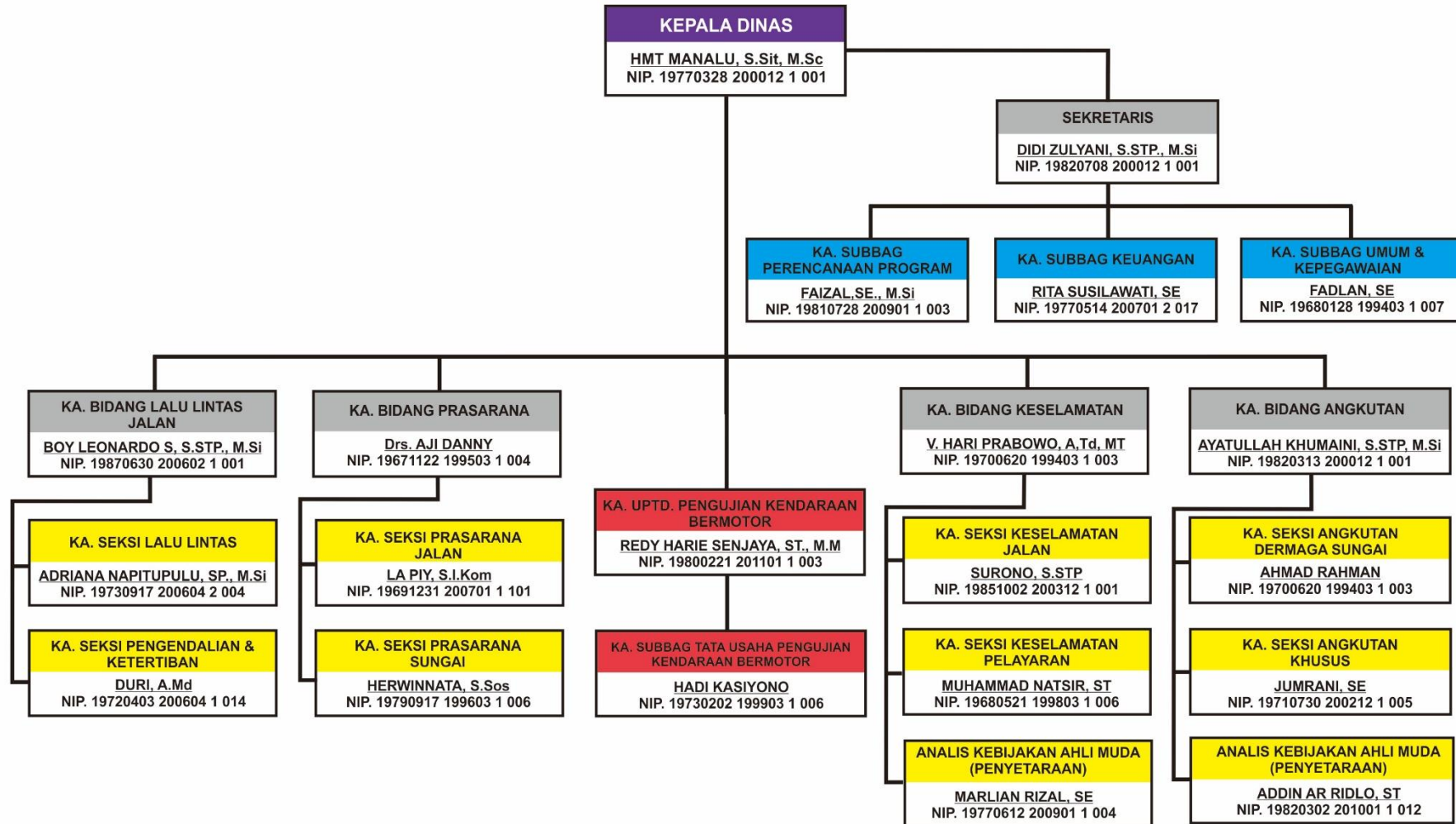
Dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program
3. Bidang Lalu Lintas Jalan membawahkan :
 - a. Seksi Lalu Lintas
 - b. Seksi Pengendalian & Ketertiban
4. Bidang Prasarana membawahkan :
 - a. Seksi Prasarana Jalan
 - b. Seksi Prasarana Sungai
5. Bidang Keselamatan membawahkan :
 - a. Seksi Keselamatan Jalan
 - b. Seksi Keselamatan Pelayaran
6. Bidang Angkutan membawahkan :
 - a. Seksi Angkutan & Dermaga Sungai
 - b. Seksi Angkutan Khusus
 - c. Sub Koordinator Angkutan Jalan
7. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Samarinda



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA



E. SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN

Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Samarinda terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya seperti peralatan/ perlengkapan/ aset. Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat.

1. Sumber Daya Manusia

Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2022 – 2025

Jabatan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Eselon II	1	0	1	0	1	0	1	0
Eselon III	5	0	5	0	5	0	4	0
Eselon IV	13	2	11	2	12	2	13	2
Jumlah	19	2	17	2	18	2	18	2
Total	21		19		20		20	

Sumber : Database Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dishub Kota Samarinda, Tahun 2025

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2022 – 2025

Kualifikasi Pendidikan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Sekolah Dasar (SD)	3	0	2	0	1	0	1	0
SMP	4	0	3	0	3	0	1	0
SMA / SMK	42	10	41	4	35	4	36	4
Ahli Muda (D-II)	1	0	1	0	1	0	1	0
Sarjana Muda (D-III)	7	2	5	2	3	2	5	2
Sarjana (S1/D-IV)	17	7	16	10	22	9	16	9
PascaSarjana (S2)	8	0	10	0	8	0	7	1
Jumlah	81	19	77	16	73	15	67	16
Total	100		93		88		83	

Sumber : Database Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dishub Kota Samarinda, Tahun 2025

Tabel 1.3 PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu Tahun 2025

Kualifikasi Pendidikan	Penuh Waktu		Paruh Waktu	
	L	P	L	P
Sekolah Dasar (SD)	0	0	0	0
SMP	0	0	0	0
SMA / SMK	51	13	161	23
D – I	0	0	0	0
D – II	0	0	0	0
Sarjana Muda (D-III)	0	0	0	0
Sarjana (S1/D-IV)	0	0	0	0
Sarjana (S2)	0	0	0	0
Jumlah	51	13	161	23
Total	64		184	

Sumber : Database Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dishub Kota Samarinda, Tahun 2025

Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2022 – 2025

Pangkat dan Golongan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	L	P	L	P	L	P	L	P
I/a Juru Muda	0	0	0	0	0	0	0	0
I/b Juru Muda Tk. I	3	0	0	0	0	0	0	0
I/c Juru	0	0	2	0	1	0	1	0
I/d Juru Tk. I	3	0	0	0	0	0	0	0
II/a Pengatur Muda	1	0	4	0	6	0	4	0
II/b Pengatur Muda Tk. I	13	2	1	1	2	0	1	1
II/c Pengatur	21	3	11	2	6	2	9	1
II/d Pengatur Tk. I	23	2	15	2	6	1	12	1
III/a Penata Muda	3	0	15	2	20	2	14	3
III/b Penata Muda Tk. I	9	7	2	0	6	0	2	0
III/c Penata	9	3	3	5	3	5	4	5
III/d Penata Tk. I	8	4	13	6	6	4	13	5
IV/a Pembina	5	0	7	0	15	1	5	1
IV/b Pembina Tk. I	1	0	2	0	2	0	1	0
IV/c Pembina Utama Muda	1	0	1	0	0	0	0	0
IV/d Pembina Utama Madya	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	100	21	75	16	73	15	66	17
TOTAL	121		93		88		83	

Sumber : Database Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dishub Kota Samarinda, Tahun 2025

2. Sumber Daya Lainnya

Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan pada masyarakat mendapat dukungan dari sarana dan prasarana, antara lain sebagai berikut:

Tabel : 1.5 Aset Dinas Perhubungan Kota Samarinda Per 31 Desember Tahun 2025

No.	Nama Barang (Berdasarkan Bidang Barang)	Keadaan Per 31 Des 2023	
		Jumlah	Harga (Ribuan)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tanah	13	92.537.149.000,00
2.	Alat Besar	1038	12.176.341.342,00
3.	Komputer	808	10.500.718.616,00
4.	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	6	4.695.300,00
5.	Alat Bantu Eksplorasi	4	416.105.700,00
6.	Alat Keselamatan Kerja	49	340.362.900,00
7.	Rambu-Rambu	935	22.103.590.911,00
8.	Alat Angkutan	93	11.859.446.410,00
9.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	282	5.109.400.920,00
10.	Alat Pertanian	12	12.207.000,00
11.	Alat kantor dan rumah tangga	1808	21.970.735.602,00
12.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1469	5.281.965.435,00
13.	Alat kedokteran dan kesehatan	56	366.802.804,00
14.	Alat Laboratorium	754	28.000.893.855,00
15.	Alat Persenjataan	42	121.331.600,00
16.	Bangunan Gedung	81	398.694.000.239,00
17.	Bangunan Menara	1	174.763.000,00
18.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1	1.196.509.600,00
19.	Jalan dan Jembatan	24	23.196.191.845,00
20.	Bangunan Air	2	961.146.500,00
21.	Instalasi	13	7.062.907.250,00
22.	Jaringan	45	15.284.328.771,00
23.	Kontruksi dalam Pengerjaan	2	831.565.676,00
		7.538	658.203.160.276,00

Tabel 1.6
Data Sarana Operasional Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2022 – 2025

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Keterangan
Mobil Operasional	10	10	10	10	Kondisi Baik
Mobil Derek	3	3	3	3	Kondisi Baik
Mobil Uji Keliling	1	1	1	1	Kondisi Baik
Mobil APILL	2	2	3	3	Kondisi Baik
Mobil Dinas	13	13	13	13	Kondisi Baik
Sepeda Motor Operasional	16	16	16	16	Kondisi Baik
Sepeda Motor Dinas	31	31	31	31	Kondisi Baik
JUMLAH	76	76	77	77	Unit

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2025

F. ISU-ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan yang terangkat berdasarkan kondisi faktual di lapangan, dimana isu strategis mengacu terhadap permasalahan yang memungkinkan mempunyai pengaruh yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi atau progres kinerja di masa mendatang. Dengan memprioritaskan penanganan identifikasi permasalahan tersebut maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan akan lebih besar.

Secara umum Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik yang menjadi kondisi urusan perhubungan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan komitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat, adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan antara lain :

1. Kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Samarinda yang baik, dengan indikator kepemilikan kendaraan pribadi yang meningkat baik roda dua maupun roda empat, berimbas pada minat penggunaan Jasa Angkutan Umum Kota yang menurun sehingga para pengusaha atau pemilik angkutan kota tidak dapat mencapai kondisi ideal secara ekonomi dalam usahanya sehingga tidak mampu untuk melakukan penggantian atau peremajaan armadanya.
2. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan belum optimal,

Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan pertumbuhan infrastruktur jaringan jalan sehingga perbandingan volume dan kapasitas jalan (V/C Ratio) berdampak pada penundaan dan berpotensi terjadinya kemacetan lalu lintas.

3. Pengelolaan perpustakaan belum optimal untuk mengatasi kemacetan, Belum tersedianya kantong-kantong parkir yang belum memadai sehingga berdampak pada aktivitas parkir tepi jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya sehingga berpotensi terhadap ketidakdisiplinan berlalu lintas, kesemrawutan berlalu lintas dan mengurangi kapasitas jalan, hal ini dapat diantisipasi dengan gedung parkir.
4. Ketersediaan perlengkapan jalan belum optimal dari segi kuantitas dan kualitas, Fasilitas perlengkapan dan Keselamatan Jalan dalam bentuk Marka, Rambu, RPPJ, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan paku jalan serta pagar pengaman jalan (Guardrail) belum sebanding dengan kebutuhan jaringan jalan yang terbangun, sehingga kondisi ini terkesan kurang optimalnya dalam memberikan informasi yang baik kepada masyarakat dalam berlalu lintas, hal ini dapat didukung dengan penganggaran yang proporsional.
5. Menurunnya kinerja angkutan umum di Kota Samarinda, Kurangnya partisipasi pengusaha angkutan sungai dan pengetahuan pemilik kapal di bidang Pelayanan Jasa Angkutan sehingga tingkat kinerja pelayanan angkutan sungai sangat rendah dan kurang diminati masyarakat.
6. Seluruh pemilik kapal sungai sangat sulit diberikan pemahaman dikarenakan latar belakang pendidikan formal yang mereka miliki.

G. HASIL DAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2024

Tabel 1.7. Progres Nilai AKIP

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI 2023	NILAI 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Perencanaan Kinerja	30%	26,50	29,5
2.	Pengukuran Kinerja	30%	21,50	21
3.	Pelaporan Kinerja	15%	11,25	12,5
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	16,50	16
J U M L A H		100%	75,75	79

Tindak Lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Kota Samarinda terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.8 Tindak Lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat

NO	KOMPONEN	KELEMAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
A..	PERENCANAAN KINERJA	Belum terdapat Crosscutting antar bidang Terhadap IKU	Membuat Crosscutting antar bidang terhadap IKU	Membuat Crosscutting antar bidang terhadap IKU
B.	PENGUKURAN KINERJA	<p>1. Pengukuran kinerja telah disusun per 6 (enam) bulan dan pertahun pada IKU Dinas Perhubungan Kota Samarinda namun belum diukur per 3 (tiga) bulan/triwulan serta belum dilengkapi bukti dukung</p> <p>2. Hasil laporan monev dan notulen rapat per triwulan yang belum memuat pembahasan hasil pengukuran kinerja (capaian target) dalam penyesuaian strategi, penyesuaian kebijakan, penyesuaian aktivitas dan penyesuaian anggaran dan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja pada triwulan berikutnya</p>	Melakukan pengukuran kinerja per 3 (tiga) bulan / triwulan dan dilengkapi bukti dukung perhitungan IKU, laporan monev dan notulen rapat yang membahas pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian strategi, penyesuaian kebijakan, penyesuaian aktivitas dan penyesuaian anggaran	Melakukan pengukuran kinerja per 3 (tiga) bulan / triwulan dan dilengkapi bukti dukung perhitungan IKU, laporan monev dan notulen rapat yang membahas pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian strategi, penyesuaian kebijakan, penyesuaian aktivitas dan penyesuaian anggaran;
C.	PELAPORAN KINERJA	Laporan kinerja belum bernomor	Memformalkan laporan kinerja dengan memberi nomor, tanggal, bulan, tahun, tanda tangan dan stempel;	Memformalkan laporan kinerja dengan memberi nomor, tanggal, bulan, tahun, tanda tangan dan stempel;
		Pelaporan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian seluruh pegawai dan belum dijadikan dasar untuk penyesuaian aktivitas, penyesuaian anggaran, serta perubahan budaya kinerja organisasi.	Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai perhatian seluruh pegawai untuk penyesuaian aktivitas, penyesuaian anggaran, dan adanya efisiensi anggaran, menurunnya angka pelanggaran / hukuman disiplin serta adanya inovasi kerja;	Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai perhatian seluruh pegawai untuk penyesuaian aktivitas, penyesuaian anggaran, dan adanya efisiensi anggaran, menurunnya angka pelanggaran / hukuman disiplin serta adanya inovasi kerja;

D.	PENGUKURAN KINERJA	Evaluasi internal telah dilakukan pada Aplikasi Simuara namun masih terdapat salah upload dokumen laporan hasil evaluasi internal tahun 2024 di aplikasi simuara dikarenakan tidak adanya pemisahan tugas antara penyusun dan evaluator	Memisahkan tugas antara penyusun dan evaluator internal dalam melakukan evaluasi internal dan semua evaluator internal mengikuti sosialisasi/diklat /bimtek/workshopAKIP;	Memisahkan tugas antara penyusun dan evaluator internal dalam melakukan evaluasi internal dan semua evaluator internal mengikuti sosialisasi/diklat /bimtek/workshopAKIP;
		Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah melakukan evaluasi internal terhadap akuntabilitas kinerja namun beberapa rekomendasi dari hasil evaluasi tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti dengan tepat sesuai rekomendasi;	Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi tahun sebelumnya secara tepat;	Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi tahun sebelumnya secara tepat;

H. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan sistematika yang dianjurkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. LANDASAN HUKUM
- C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
- D. STRUKTUR ORGANISASI
- E. SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN
- F. ISU-ISU STRATEGIS
- G. HASIL DAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2024
- H. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Tujuan dan Sasaran
 - 3. Strategi dan Kebijakan
- B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
- C. PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
 - 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
 - 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
 - 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
 - 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. MATRIK PENILAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini menjelaskan mekanisme evaluasi terhadap capaian kinerja organisasi berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, guna memastikan akuntabilitas dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan menyeluruh LKjIP Dinas Perhubungan Kota Samarinda tahun 2025.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di mana tertera pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Memasuki Tahun 2025, Dinas Perhubungan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029. Renstra Dinas Perhubungan merupakan manifestasi komitmen Dinas Perhubungan dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029.

RPJMD Pemerintah Kota Samarinda merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda. Rencana Strategis (Renstra) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Perhubungan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra ini disusun untuk lebih mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan program sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda. Adapun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan diuraikan berikut ini.

1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Pada dasarnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD merupakan penjabaran secara terperinci dari perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda, dengan demikian setiap tahapan-tahapan yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda harus

selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025 - 2029.

Memperhatikan prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMD serta berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda 2024 – 2045 yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2024, maka Visi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

“ SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU “

Untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029, maka ditetapkan 5 (Lima) Misi dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing.

2. Ekonomi Kota

Mewujudkan ekonomi samarinda yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan

3. Infrastruktur

Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan

4. Lingkungan Kota

Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis

5. Pemerintahan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel

2. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan juga merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan Misi. Dalam rangka mewujudkan keselarasan antara Sasaran Perubahan RPJMD dengan Dokumen Perubahan Renstra, maka Sasaran RPJMD menjadi Tujuan Renstra Dinas Perhubungan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Perhubungan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategi yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Selain Sasaran utama tersebut pada Dokumen Perubahan Renstra ditetapkan pula Sasaran tambahan sebagai Sasaran Pendukung pada Program Kegiatan Rutin, Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan RPJMD Kota Samarinda pada Misi Ke. 3 (tiga) tersebut adalah **“Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas”** Sedangkan Sasaran RPJMD untuk mendukung terwujudnya misi tersebut adalah **Meningkatnya Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi** dengan indikator **“Rasio Konektivitas”**, Sasaran RPJMD Kota Samarinda ini selanjutnya menjadi Tujuan Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang selaras dengan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas	Meningkatkan Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi	Rasio Konektivitas	57,67	42,97	53,74	68,79	79,56

A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. STRATEGI

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi Perangkat Daerah. Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Proses perencanaan strategis merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan mempertahankan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam

melaksanakan tujuan dan sasaran sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan.

Adapun strategi Dinas Perhubungan dalam Dokumen Renstra Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi.

Dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi, pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi Zero To Accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan/keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah.

Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan yang belum sepenuhnya berkembang, termasuk pada daerah perbatasan antar kabupaten/kota. Selain itu, pemanfaatan sungai sebagai media transportasi sungai dapat dikembangkan sebagai sistem angkutan alternatif bagi masyarakat untuk tidak berorientasi pada pemanfaatan angkutan jalan.

3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi

Pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana transportasi.

4. Mengembangkan sistem layanan transportasi untuk mendukung lingkungan kota yang berkelanjutan.

Pemicu terbesar meningkatnya polusi udara di daerah perkotaan adalah disebabkan oleh sektor transportasi. Oleh karena itu, penekanan polusi udara dapat dilakukan dengan pendekatan peningkatan layanan angkutan umum, terutama angkutan umum massal dan orientasi penggunaan bahan bakar listrik yang sudah dikembangkan

sebagai pilihan penggunaan sarana angkutan. Di samping itu, keberadaan ruang terbuka hijau, terutama pada daerah-daerah yang dilintasi oleh kendaraan bermotor dikembangkan yang sekaligus memberikan kesan estetika ruang kota yang lebih baik.

5. Melaksanakan kegiatan kajian dan penelitian pengembangan bidang perhubungan.

Dalam rangka perencanaan dan pembangunan serta pengembangan pada sektor perhubungan sangat diperlukan adanya kajian awal sebagai gambaran tujuan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan melakukan pelibatan stakeholder, baik bersifat konsultatif, pelibatan Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, ataupun dilakukan secara swakelola. Hal ini dimaksudkan untuk tersedianya dokumentasi perencanaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan program aksi kegiatan, termasuk orientasi pembuatan peraturan-peraturan daerah terkait dengan sektor perhubungan.

6. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi di bidang peraturan, kebijakan dan standar.

Posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Begitu pula dengan kedudukan Dinas Perhubungan Kota dalam memadukan dan mengintegrasikan semua komponen aspek transportasi yang bukan dalam kewenangannya melalui pelibatan secara koordinatif antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi. Restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jati dirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Isu strategis tersebut dijabarkan ke dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor Perhubungan.

Tabel. 2.2 Rencana Strategis Periode Tahun 2025-2029 Dinas Perhubungan Kota Samarinda

No	Uraian	Indikator
1.	Core Busniess (Fungsi Utama) PD Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Penyediaan infrastruktur transportasi dan fasilitas perlengkapan jalan
2.	Visi	Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju
3.	Misi	Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
4.	Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Samarinda yang baik, dengan indikator kepemilikan kendaraan pribadi yang meningkat baik roda dua maupun roda empat. 2. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan belum optimal. 3. Ketersediaan perlengkapan jalan belum optimal dari segi kuantitas dan kualitas. 4. Terbatasnya Kualitas dan kuantitas SDM yang bersertifikat keahlian di bidang perhubungan
5.	Tujuan	Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas
6.	Sasaran	Meningkatkan Kualitas Keselamatan dan Kualitas layanan Transportasi
7.	Strategi	Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi darat dan sungai.
8.	Arah Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan infrastruktur transportasi dan fasilitas perlengkapan jalan. 2. Penyediaan infrastruktur transportasi sungai 3. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.
9.	Program	<ol style="list-style-type: none"> 4. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). 5. Program pengelolaan pelayaran 6. Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran sehingga memperjelas strategi menjadi lebih spesifik/fokus, konkrit, dan

operasional. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi Walikota Samarinda. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perhubungan Kota Samarinda memiliki Arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyediaan Infrastruktur Transportasi dan Fasilitas Perlengkapan Jalan.
2. Penyediaan Infrastruktur Transportasi dan Fasilitas Pelabuhan Dermaga Sungai
3. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

VISI : SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU			
MISI : MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas	Meningkatkan Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi	Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi darat dan sungai	Penyediaan infrastruktur transportasi dan fasilitas perlengkapan jalan
			Penyediaan infrastruktur transportasi dan fasilitas pelabuhan dermaga sungai
			Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 untuk Dinas Perhubungan Kota Samarinda (Tabel T-C.26, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang pedoman penyusunan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Samarinda dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Samarinda

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	ALASAN	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi	Rasio Konektivitas	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	IK1 X Bobot angkutan jalan + IK2 X Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda

C. PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Penyusunan rencana kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang indikator kinerja dan target yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan, di mana penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan realitas dengan memperhatikan tujuan dan sasaran serta data pendukung yang harus disiapkan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2025 serta

menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025 pada anggaran murni, secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Anggaran Murni Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Jumlah	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	0,47	Rasio
2.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	Persentase Capaian Kinerja Program Dinas Perhubungan	100%	Persen

No.	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 55.251.514.158,-
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 59.099.112.063,-
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 5.039.681.000,-
4.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp. 795.518.000,-
Jumlah APBD Murni		Rp. 120.185.825.221,-

Di tahun 2025 Dinas Perhubungan menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 di mana Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan pada anggaran murni masih menggunakan Renstra Lama, sedangkan pada Anggaran Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan mengalami perubahan pada bulan Nopember 2025.

Pada bulan nopember perjanjian kinerja untuk anggaran perubahan dibuat berdasarkan dokumen Renstra terbaru hal ini disesuaikan dengan kondisi sebagai berikut :

1. Mendukung Tujuan Pembangunan Daerah yang berpedoman pada Visi, Misi Walikota dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas yang berorientasi konektivitas wilayah.
2. Rasio Konektivitas menggambarkan kualitas layanan, mengukur dampak transportasi terhadap daerah tertentu dan menunjukkan keberhasilan membuka keterisolan wilayah.
3. Menyesuaikan dengan sasaran strategis bidang transportasi yang mempermudah proses

sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah.

4. Rasio konektivitas mendukung prinsip efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kerja dengan memungkinkan pengukuran dampak nyata pembangunan transportasi, evaluasi efektivitas program dan penyusunan kebijakan berbasis hasil dan manfaat langsung bagi masyarakat.
5. Dalam upaya peningkatan kualitas pelaporan kinerja rasio konektivitas mencerminkan kinerja pelayanan transportasi secara menyeluruh sehingga lebih sesuai dengan arah kebijakan inmendagri no. 2 tahun 2025.

Adapun Perjanjian Kinerja pada anggaran perubahan sebagai berikut :

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Anggaran Perubahan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Jumlah	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi	Rasio Konektivitas	57,67	Nilai

Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Samarinda melaksanakan kegiatan dengan Anggaran Murni (APBD Tahun 2025) sebesar Rp. 120.185.825.221,- (*seratus dua puluh milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah*). Melalui mekanisme Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 115.781.053.985,- (*seratus lima belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah*). Adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel sebagaimana di bawah ini :

Tabel 2.7 Pagu Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja sampai dengan APBD-P Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 55.251.514.158,-	Rp. 54.346.749.609,-	APBD 2025
2.	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Rp. 59.099.112.063,-	Rp. 56.452.152.626,-	APBD 2025
3.	Program pengelolaan pelayaran	Rp. 5.039.681.000,-	Rp. 4.982.151.750,-	APBD 2025
4.	Program pengelolaan perkeretaapian	Rp. 795.518.000,-	-	APBD 2025
TOTAL		Rp. 120.185.825.221,-	Rp. 115.781.053.985,-	

Perjanjian kinerja di atas memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan Indikator Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) di dalam Sub Bab ini akan memuat Indikator Program secara terperinci. Adapun rincian Indikator Program adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Rincian Indikator Program

No	Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,48
		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	75,75
2.	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat	0,58
		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	40 %
		Persentase Kendaraan Layak Uji	53%
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Konektivitas sungai	0,57

Tabel di atas memuat rincian program, Indikator Program beserta target yang akan dicapai ditahun 2025, Indikator Program ini merupakan indikator kinerja Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang), Selain indikator program di dalam Sub Bab ini akan memuat Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan secara terperinci. Adapun rincian Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9 Keterkaitan sasaran strategis, indikator kinerja, target, program, kegiatan dan sub kegiatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	Pagu Indikatif (Rp)
Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi	Rasio Konektivitas	57,67	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	IKM NILAI AKIP	87,48 80	54.346.749.609,00
				Perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	100%	221.556.000,00
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	17 Dokumen	138.829.500,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	41.152.750,00
				Evaluasi kinerja perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	41.573.750,00
				Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampau dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	Pagu Indikatif (Rp)
				Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan	1 Laporan	23.946.110.055,00
				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	111 Pegawai	16.228.934.305,00
				Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen	7.670.507.000,00
				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4 Laporan	46.668.750,00
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah	4 Dokumen	37.680.939,00
				Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah	4 Dokumen	18.802.514,00
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	4 dokumen	18.878.425,00
				Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah laporan	1 Laporan	1.470.070.698,00
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Paket	61.080.400,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	Pagu Indikatif (Rp)
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	760.202.000,00
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 Paket	27.940.000,00
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	356.692.150,00
				Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan	43.770.000,00
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	220.386.148,00
				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	4 Laporan	1.511.010.000,00
				Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	1.011.075.000,00
				Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Unit	499.935.000,00
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan penyedia jasa	4 Laporan	25..980.714.017,00
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	25.868.934.017,00
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan	111.780.000,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	Pagu Indikatif (Rp)
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan pemeliharaan	4 Laporan	1.179.607.900,00
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30 Unit	848.744.900,00
				Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	139.624.000,00
				Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	191.239.000,00
Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi	Rasio Konektivitas	7,67	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat	0,58	53.780.417.949,00
				Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah perlengkapan jalan tersedia	7 Unit	47.099.709.949,00
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten/kota yang terbangun	1 Unit	76.430.000,00
				Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten / kota yang tersedia	7 Unit	43.533.609.042,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	Pagu Indikatif (Rp)
				Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	500.000.000,00
				Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan Terpelihara	7 Unit	2.989.670.907,00
				Pengelolaan terminal penumpang tipe C	Jumlah terminal tipe C terkelola	1 Unit	0
				Pembangunan gedung terminal Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas Penunjang	1 Unit	0
				Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Jumlah fasilitas parkir tersedia	4 Laporan	3.875.107.302,00
				Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	4 Laporan	3..875.107.302,00
				Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	4 Laporan	1.922.520.000,00
				Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten / kota	4 Laporan	1.0448.588.000,00
				Sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/ kota	1 Dokumen	214.602.500,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	Pagu Indikatif (Rp)
				Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota	4 Laporan	60.600.000,00
				Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	198.729.500,00
				Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin	4 Laporan	99.107.500,00
				Pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin	Jumlah laporan rekomendasi persetujuan teknis Andalalin yang terawasi	4 Laporan	99.107.500,00
				Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	4 Laporan	444.869.750,00
				Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan Terminal	Jumlah laporan inspeksi, Audit dan pemantauan terminal	4 laporan	0,00
				Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	4 Laporan	250.717.500,00
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 Laporan	0,00
				Peningkatan kapasitas auditor dan inspektur LLAJ	Jumlah auditor dan inspektur lalu lintas dan angkutan jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	8 Orang	129.716.000,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	Pagu Indikatif (Rp)
				Pelaksanaan pengawasan melalui uji petik terhadap unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor	Jumlah laporan uji petik terhadap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	4 Laporan	64.181.250,00
				Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia	1 Laporan	90.181.000,00
				Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan / atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten / kota	1 Laporan	90.181.000,00
				Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah armada angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah	8 Unit	0,00
				Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan	1 Dokumen	113.368.625,00
				Pengendalian Pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	1 Dokumen	0,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	Pagu Indikatif (Rp)
				Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan kebijakan dan tersosialisasinya rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	1 Dokumen	113.368.625,00
				Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah/kota	Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang	4 Laporan	135.553.500,00
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek		0,00
				Facilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah laporan pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten / kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	4 Laporan	135.553.500,00
				Program Pengelolaan Pelayaran	Konektivitas sungai	0.57	4.982.151.750,00
				Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota	1 Laporan	80.605.500,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	Pagu Indikatif (Rp)
				Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan kabupaten / kota	1 Laporan	80.605.500,00
				Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan	4 Laporan	138.814.000,00
				Pengendalian dan pengawasan jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam kabupaten/kota	Jumlah laporan Pengendalian dan pengawasan jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	4 Laporan	138.814.000,00
				Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau	Jumlah dokumen penetapan rencana induk DLKR/DL KP pelabuhan sungai	1 Dokumen	496.835.000,00
				Pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau	Jumlah dokumen rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR) / daerah lingkungan kepentingan (DLKP) pelabuhan sungai dan danau	1 Dokumen	496.835.000,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	Pagu Indikatif (Rp)
				Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	4 Laporan	4.265.897.250,00
				Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	Jumlah pelabuhan sundai dan danau yang beroperasi dan terpelihara	1 Unit	296.488.000,00
				Pembangunan Dermaga sungai dan danau	Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang dibangun	1 Unit	2.918.193.250,00
				Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah dermaga sungai dan danau yang dipelihara	4 Unit	733.528.000,00
				Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau penyeberangan	Jumlah fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau penyeberangan	5 Unit	317.688.000,00
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan	32.428 Unit	2.671.735.000,00
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	151 Unit	975.281.000,00
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala	Jumlah sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya	16 Orang	190.728.000,00
				Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	2000 Unit	100.000.000,00
				Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor	4 Laporan	100.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	Pagu Indikatif (Rp)
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	85 Unit	1.225.000.000,00
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	20.000 Dokumen	80.726.000,00
							Rp. 115.781.053.985,-

Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan/ Sasaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025.

Tabel 2.10 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi	Rasio Konektivitas	57,67	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab./ Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kab./Kota
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe-C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab./Kota

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
					Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota
					Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota
						Sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota
						Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota
						Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
					Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin
					Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi
						Peningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ
						Pelaksanaan pengawasan melalui uji petik terhadap unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor
					Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah/kota	Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan kabupaten/kota
					Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Pengendalian dan pengawasan jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam kabupaten/kota
					Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau	Pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau
					Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau
						Pembangunan Dermaga sungai dan danau
						Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
						Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau penyeberangan
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
						Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
						Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
						Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						Evaluasi kinerja perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
						Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
						Fasilitas kunjungan tamu
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
						Pengadaan mebel
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kemudian disajikan matriks anggaran setiap sasaran strategis pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.11 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	Prosentase	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Rasio Konektivitas	Rp 115.781.053.985,-	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Tahun 2025 Rp. 120.185.825.221,- • APBD Perubahan Tahun 2025 berkurang sebesar Rp. 115.781.053.985,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasarannya, yang hasilnya akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja instansi pemerintah.

Penilaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan mengacu pada Renstra dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dengan ini disusunlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk menggambarkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja di mulai dari Target Tujuan Dinas Perhubungan yang merupakan Sasaran RPJMD Kota Samarinda lalu mengukur indikator sasaran strategis/Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Samarinda, selanjutnya mengukur target indikator program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran Tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
1	90,01% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	75,01% ≤ 90%	Tinggi
3	65,01% ≤ 75 %	Sedang
4	50,01% ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

A.1 CAPAIAN KINERJA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Samarinda merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Dinas Perhubungan Kota Samarinda sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah :

Meningkatkan Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi
Indikator : *Rasio Konektivitas*

Makna Meningkatkan Kualitas Keselamatan dan kualitas layanan transportasi adalah suatu upaya untuk meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan transportasi dalam menjamin keselamatan pengguna melalui pemenuhan standar keselamatan, kelayakan sarana prasarana serta pengawasan dan pengendalian transportasi yang dapat memberikan pelayanan yang aman, nyaman, tertib dan andal kepada masyarakat.

Dengan meningkatnya ketersediaan sarana prasarana perhubungan maka diharapkan kebutuhan masyarakat terhadap jasa sarana prasarana perhubungan akan terpenuhi sehingga masyarakat merasa nyaman, aman dan selamat dalam menggunakan sarana prasarana Perhubungan sehingga akan tercipta kondisi lalu lintas yang tertib, lancar dan berkurangnya kemacetan serta menurunnya angka kecelakaan. Tolok ukur keberhasilan capaian sasaran Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan diukur dengan **Indikator Rasio Konektivitas**.

Rasio Konektivitas menggambarkan tingkat keterhubungan jaringan transportasi antar wilayah. Peningkatan rasio konektivitas menunjukkan semakin terintegrasinya sistem transportasi yang berdampak pada kelancaran mobilitas, efisiensi distribusi, serta peningkatan akses masyarakat

terhadap layanan transportasi.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi kinerja utama tahun ini, dengan tahun kemarin.

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)/(5)*100
1.	Rasio Konektivitas	Nilai	57,67	43,7	75,77

A.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No.	Indikator Kinerja	2024			2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 Terhadap Renstra (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)*100	(6)	(7)	(8)=(6)/(7)*100	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1.	Rasio Konektivitas	41,00	41,00	100,00	57,67	43,7	75,77	79,56	54,92

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Capaian Rasio Konektivitas diuraikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	TRIWULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100
1	Meningkatkan Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi	Rasio Konektivitas	57,67	Triwulan I	0	0	0
				Triwulan II	0	0	0
				Triwulan III	0	0	0
				Triwulan IV	57,67	43,7	75,77%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target yang telah ditetapkan adalah 57,67 dan

teralisasi dengan angka 43,7 dengan begitu maka capaian kinerja menurut permendagri nomor 86 tahun 2017 capaian kinerja berkategori Tinggi namun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Belum tercapainya target rasio konektivitas ini disebabkan oleh belum terlayannya beberapa trayek yang menjadi komponen perhitungan indikator. Kondisi ini dipengaruhi oleh Kecenderungan masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi dibanding menggunakan transportasi umum dikarenakan mudah mendapatkannya terutama secara kredit, Keterbatasan sarana dan prasarana transportasi (adanya wilayah atau trayek tertentu yang memiliki tingkat permintaan rendah dan kondisi unit yang sudah berusia di atas 15 tahun) serta penyesuaian kebijakan serta hambatan teknis.

Capaian Indikator Rasio Konektivitas Kota Samarinda dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$(IK1 \times \text{Bobot Angkutan Jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan})$$

Keterangan :

IK 1 (Angkutan Jalan)

= Jumlah trayek yang dilayani pada Kabupaten/Kota x Bobot Trayek dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten/Kota tersebut

IK 2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)

= Jumlah Lintas penyeberangan yang berpotensi pada Kabupaten/Kota x Bobot lintas dibagi Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota.

Bobot Trayek atau Lintas :

- Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu) Bobot = 1
- Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (3-4 dalam seminggu) Bobot = 0,8
- Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (<3x dalam seminggu) Bobot = 0,5

Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:

1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)
2. Wilayah yang Tingkat pelayanan angkutan Laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)
3. Wilayah yang Tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)
4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)

Perhitungan Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota :

Rasio konektivitas Kota Samarinda = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan).

Keterangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70)

- a. Perhitungan IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada kota Samarinda x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kota Samarinda)

$$\text{Hasil Perhitungan IK1} = (12 \times 1) / 32 = 0,38$$

Tabel. 3.4 Perhitungan IK 1 (Angkutan Jalan)

No	Layanan	Trayek Terlayani	Kebutuhan Trayek	Rata-rata Bobot Trayek
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Antar Kota Dalam Kabupaten/Kota	12	32	1

- b. Perhitungan IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kota Samarinda x bobot lintas) dibagi (Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kota Samarinda)

$$\text{Hasil Perhitungan IK2} = (4 \times 1) / 7 = 0,57$$

Tabel. 3.5 Perhitungan IK 1 (Angkutan Jalan)

No	Layanan	Trayek Terlayani	Kebutuhan Trayek	Rata-rata Bobot Trayek
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Antar Kota Dalam Kabupaten/Kota	4	7	1

Maka Hasil Perhitungan rasio konektivitas Kota Samarinda

$$(\text{IK1 } 0,38 \times 70) + (\text{IK2 } 0,57 \times 30) = 26,6 + 17,1 = 43,7$$

Indikator Rasio Konektivitas merupakan Indikator Positif yang menyatakan bahwa semakin besar angka maka semakin baik capaian kinerjanya, Rasio konektivitas di Kota Samarinda berdasarkan target yang ditetapkan 57,67 (nilai) dengan capaian kinerja yaitu 43,7 (nilai) dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator rasio konektivitas 75,77% dari target yang ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan konektivitas jaringan transportasi telah dilaksanakan dan memberikan hasil, namun belum sepenuhnya mencapai target kinerja yang direncanakan. Belum optimalnya capaian rasio konektivitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran dan peningkatan infrastruktur, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan serta adanya penyesuaian prioritas program dan kebijakan daerah.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya disajikan dalam tabel perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel. 3.6 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Rasio Konektivitas	82,8	85,8	Sangat Tinggi	41,0	41,0	Sangat Tinggi	57,67	43,7	Tinggi

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Pada Sub bab ini mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Target Akhir 2029	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=5/6*100
1.	Meningkatkan Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi	Rasio Konektivitas	Nilai	43,7	79,56	54,92%

4. Realisasi Kinerja Mengacu Pada Standar Nasional/Lainnya

Pada sub bab ini membandingkan realisasi kinerja tahunan dengan standar nasional/lainnya.

Tabel 3.8 Realisasi Kinerja Mengacu Pada Standar Nasional/Lainnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Realisasi Nasional	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=5/6*100
1	Meningkatkan Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi	Rasio Konektivitas	Nilai	43,7	69,0	-

Capaian indikator Rasio Konektivitas Transportasi pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa nilai yang dicapai daerah masih berada di bawah capaian rata-rata nasional. Perbandingan ini digunakan sebagai benchmarking kinerja untuk memberikan gambaran posisi daerah dalam konteks pembangunan transportasi secara nasional.

Perbedaan capaian tersebut tidak dapat dimaknai sebagai rendahnya kinerja perangkat daerah, mengingat terdapat perbedaan kewenangan pengelolaan prasarana transportasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Sebagian besar jaringan transportasi strategis yang mempengaruhi nilai rasio konektivitas merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sehingga capaian daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan intervensi lintas sektor.

Selain itu, karakteristik geografis wilayah, sebaran pusat kegiatan, serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah turut memengaruhi tingkat pencapaian indikator rasio konektivitas. Kondisi ini menyebabkan kecepatan peningkatan konektivitas antarwilayah di daerah tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan capaian nasional.

Dengan demikian, perbandingan capaian daerah dengan nasional dalam indikator ini tidak digunakan sebagai tolok ukur langsung keberhasilan kinerja daerah, melainkan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran untuk merumuskan kebijakan peningkatan konektivitas yang lebih terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan ke depan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Dalam rangka untuk mencapai keberhasilan Kinerja Indikator Sasaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda tentunya mengalami hal – hal yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun analisis penyebab keberhasilan/kegagalan adalah sebagai

berikut :

- Keterbatasan armada angkutan jalan sehingga dapat menghambat konektivitas
- Beralihnya pengguna moda transportasi dari angkutan umum ke angkutan pribadi.
- Adanya anggapan bahwa angkutan umum kurang prestisius dan privasi dari pada kendaraan pribadi.
- Pada wilayah atau trayek tertentu memiliki tingkat permintaan rendah.
- Usia kendaraan umum yang beroperasi di jalan rata-rata di atas 15 tahun sehingga mengakibatkan pelayanan angkutan umum tidak optimal.
- Keterbatasan anggaran, sehingga belum seluruh trayek prioritas dapat difasilitasi sesuai perencanaan.
- Belum optimalnya kerja sama dengan pihak swasta atau operator transportasi.

Solusi dari hambatan yang dihadapi pada Rasio Konektivitas :

- Menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum terutama bagi pelajar yang belum memiliki persyaratan menggunakan kendaraan pribadi
- Mensosialisasikan kepada pengusaha awak angkutan untuk melakukan peremajaan angkutan, serta melakukan pembinaan terhadap koperasi/ badan usaha untuk meningkatkan layanan agar memenuhi standar pelayanan
- Memperbaiki kondisi armada dan mengintegrasikan transportasi umum dengan moda lain.
- Mensosialisasikan manfaat dan dampak positif angkutan massal dan mengajak *Stake Holder* untuk ikut berpartisipasi.
- Pengusulan dukungan anggaran secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pengembangan konektivitas.
- Penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya maupun swasta dalam rangka pelayanan transportasi.
- Penyusunan skala prioritas pelayanan trayek, dengan fokus pada trayek strategis yang berdampak langsung terhadap aksesibilitas masyarakat dan pertumbuhan wilayah.

Beberapa hal upaya perbaikan dan penyempurnaan Dinas Perhubungan dalam rangka pencapaian indikator tujuan Rasio Konektivitas antara lain :

- Mengembangkan kompetensi dan kualitas, efisiensi atau efektifitas dari proses kerja serta mencari dan menerapkan cara-cara (ide, solusi, metode) baru untuk meningkatkan hasil dan proses kerja.
- Melakukan evaluasi dan monitoring secara teratur dan menyeluruh untuk meningkatkan

kinerja dan pencapaian tujuan.

- Melakukan pembinaan awak angkutan umum kepada para pengusaha/koperasi angkutan umum untuk keselamatan di jalan.
- Melakukan survei Internal tiap jalur/trayek angkutan
- Mengoptimalkan rute angkutan umum yang ada untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas transportasi
- Mengupayakan pemberian pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan baik, seperti melaksanakan pemeliharaan alat uji, kalibrasi alat uji, serta pembaruan alat-alat uji yang sudah melebihi umur teknis maupun aplikasi yang sudah *out of date* hingga pelaksanaan SOP Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala untuk menjaga kualitas layanan uji laik jalan kendaraan bermotor.
- Mengupayakan peningkatan kualitas layanan angkutan umum melalui kegiatan sosialisasi, pengawasan dan pengendalian ketertiban perizinan angkutan umum, operasi laik jalan, penyelenggaraan Abdi Yasa Teladan Tingkat Kota Samarinda hingga Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini dengan menasar anak usia dini untuk mengenal angkutan umum.

6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi merupakan kemampuan untuk menggunakan sumber daya secara optimal, efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan meminimalkan pemborosan dan biaya. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dalam pencapaian hasil tersebut menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Berikut efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

6.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi SDM antara lain Kualitas SDM (Pendidikan, pelatihan, pengalaman), Struktur Organisasi (tugas, wewenang, tanggung jawab), kepemimpinan dan manajemen, komunikasi dan koordinasi.

Kualitas sumber daya manusia sangat memiliki pengaruh terhadap kemajuan dan kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Berdasarkan tabel di bawah ini Dinas Perhubungan Kota Samarinda hanya di dukung oleh 88 orang ASN (PNS & PPPK), sedangkan kebutuhan personil ASN berjumlah 335 Orang. hal ini berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Tabel 3.9 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024

RENTANG UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH TOTAL
	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	
(1)	(2)	(3)	(4)
< 24	0	0	0
25 - 34	1	1	2
35 - 44	15	6	21
45 - 54	37	10	47
> 55	12	1	13
JUMLAH	65	18	83

6.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran merujuk pada proses evaluasi untuk mengetahui sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan secara optimal, dengan memperhatikan rasio antara hasil yang dicapai dan biaya yang dikeluarkan. Dengan kata lain efisiensi dalam konteks pengelolaan anggaran mencakup bagaimana dana digunakan untuk mencapai hasil maksimal dengan sumber daya minimal.

Dalam pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

CKi : Capaian keluaran i

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

Tabel 3.10 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi	Rasio Konektivitas	57,67	43,7	75,77	115.781.053.985	112.533.025.172	97,19	0,78

Berdasarkan tabel di atas analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik karena meskipun terdapat anggaran yang tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana.

7. Program dan kegiatan yang mendukung

Program dan kegiatan yang mendukung capaian rasio konektivitas antara lain :

- Program

1. Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

Kegiatan :

- Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota
- Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota
- Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
- Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
- Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota
- Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan
- Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
- Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
- Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah/kota
- Pengujian berkala kendaraan bermotor

2. Program Pengelolaan Pelayaran

Kegiatan :

- Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 d aerah kabupaten/kota
- Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota
- Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau
- Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau

A.3 Analisis Capaian Kinerja Program

Dalam sub bab ini akan kami uraikan mengenai capaian Indikator Kinerja Program, di tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Samarinda menjalankan 3 (Tiga) program yaitu, Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dan Program pengelolaan pelayaran, Adapun penjelasan capaian Program kami sajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11 Rincian Pencapaian Indikator Program Tahun 2025

No	Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	Capaian kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=5/4*100
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	75,75	79	104,3 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,48	85,15	97,3 %
2	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat	0,58	0,38	65,5 %
		Persentase Kelengkapan Jalan Yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	40 %	40,92 %	102,3 %
		Persentase Kendaraan Layak Uji	53 %	47,3 %	89,3 %
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Konektivitas Sungai	0,57	0,57	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik, Adapun analisa Capaian indikator Program kami jelaskan dalam uraian di bawah ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 2 indikator yakni :

- Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah
 Pada tahun 2025 Nilai AKIP ditarget dengan angka 75,75 dan realisasi sebesar 79 maka dengan begitu capaian kinerja berhasil tercapai 104,3%. Implementasi SAKIP Dinas Perhubungan didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi :
 - a. Perencanaan Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja;
 - d. Evaluasi Internal.

Dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2024 diperoleh nilai **79 kategori “BB” (Sangat Baik)**, dengan nilai per komponen sebagai berikut :

Tabel 3.12 Nilai AKIP Tahun 2024

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI HASIL EVALUASI
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perencanaan Kinerja	30%	29,5
2.	Pengukuran Kinerja	30%	21
3.	Pelaporan Kinerja	15%	12,5
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	16
J U M L A H		100%	79
			BB

Tindak Lanjut atas hasil Evaluasi Inpektorat Kota Samarinda terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 TL LHE AKIP 2024

NO	KOMPONEN	KELEMAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
A..	PERENCANAAN KINERJA	Belum terdapat Crosscutting antar bidang Terhadap IKU	Membuat Crosscutting antar bidang terhadap IKU	Membuat Crosscutting antar bidang terhadap IKU
B.	PENGUKURAN KINERJA	1. Pengukuran kinerja telah disusun per 6 (enam) bulan dan pertahun pada IKU Dinas Perhubungan Kota Samarinda namun belum diukur per 3 (tiga) bulan/triwulan serta belum dilengkapi bukti dukung 2. Hasil laporan monev dan notulen rapat per triwulan yang belum memuat pembahasan hasil pengukuran kinerja (capaian target) dalam penyesuaian strategi, penyesuaian kebijakan, penyesuaian aktivitas dan penyesuaian anggaran dan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja pada triwulan berikutnya	Melakukan pengukuran kinerja per 3 (tiga) bulan / triwulan dan dilengkapi bukti dukung perhitungan IKU, laporan monev dan notulen rapat yang membahas pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian strategi, penyesuaian kebijakan, penyesuaian aktivitas dan penyesuaian anggaran	Melakukan pengukuran kinerja per 3 (tiga) bulan / triwulan dan dilengkapi bukti dukung perhitungan IKU, laporan monev dan notulen rapat yang membahas pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian strategi, penyesuaian kebijakan, penyesuaian aktivitas dan penyesuaian anggaran;
C.	PELAPORAN KINERJA	Laporan kinerja belum bernomor	Memformalkan laporan kinerja dengan memberi nomor, tanggal, bulan, tahun, tanda tangan dan stempel;	Memformalkan laporan kinerja dengan memberi nomor, tanggal, bulan, tahun, tanda tangan dan stempel;
		Pelaporan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian seluruh pegawai dan belum dijadikan dasar untuk penyesuaian aktivitas, penyesuaian anggaran, serta perubahan budaya kinerja organisasi.	Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai perhatian seluruh pegawai untuk penyesuaian aktivitas, penyesuaian anggaran, dan adanya efisiensi anggaran, menurunnya angka pelanggaran / hukuman disiplin serta adanya inovasi kerja;	Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai perhatian seluruh pegawai untuk penyesuaian aktivitas, penyesuaian anggaran, dan adanya efisiensi anggaran, menurunnya angka pelanggaran / hukuman disiplin serta adanya inovasi kerja;

D.	PENGUKURAN KINERJA	Evaluasi internal telah dilakukan pada Aplikasi Simuara namun masih terdapat salah upload dokumen laporan hasil evaluasi internal tahun 2024 di aplikasi simuara dikarenakan tidak adanya pemisahan tugas antara penyusun dan evaluator	Memisahkan tugas antara penyusun dan evaluator internal dalam melakukan evaluasi internal dan semua evaluator internal mengikuti sosialisasi/diklat /bimtek/workshopAKIP;	Memisahkan tugas antara penyusun dan evaluator internal dalam melakukan evaluasi internal dan semua evaluator internal mengikuti sosialisasi/diklat /bimtek/workshopAKIP;
		Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah melakukan evaluasi internal terhadap akuntabilitas kinerja namun beberapa rekomendasi dari hasil evaluasi tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti dengan tepat sesuai rekomendasi;	Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi tahun sebelumnya secara tepat;	Menindak lanjut rekomendasi dari hasil evaluasi tahun sebelumnya secara tepat;

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan mengukur indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan yang penting dalam mengukur keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung berdasarkan hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.

Adapun data hasil dari pengolahan data SKM menggunakan excel template dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.14 Hasil Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No	Unit Layanan	Indeks Kepuasan	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Layanan Tata Usaha	84.95	Baik
2.	Layanan Lalu Lintas Jalan	92.5	Sangat Baik
3.	Layanan Keselamatan	73.03	Kurang Baik
4.	Layanan Angkutan	88.63	Sangat Baik
Total IKM		85.15	Baik

Terdapat 4 jenis layanan pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda yaitu Layanan Tata Usaha, Layanan Lalu Lintas Jalan, Layanan Keselamatan dan Layanan Angkutan unsur dengan nilai tertinggi adalah U8 (penanganan, saran dan masukan) yaitu sebesar 4.00, menunjukkan bahwa aspek penanganan pengaduan, saran dan masukan dinilai paling memuaskan oleh penggunaan layanan. Disisi lain, nilai terendah terdapat pada U6(kompetensi pelaksana dengan skor 2,70 menandakan bahwa peningkatan kapasitas dan keahlian petugas masih sangat dibutuhkan. Indikator lainnya seperti U1 (Persyaratan), U2 (Sistem, mekanisme dan prosedur), U3 (waktu pelaksanaan), U5 (produk spesifikasi jenis pelayanan), dan U9 (sarana dan prasarana) berada di kisaran 2,80-2,90 menunjukkan performa yang cukup namun belum optimal. Secara keseluruhan, meskipun sebagian besar indikator menunjukkan nilai 3, ada beberapa aspek penting yang perlu menjadi prioritas perbaikan, khususnya dalam hal kompetensi pelaksana.

Sedangkan layanan dengan nilai tertinggi terdapat pada unsur dengan nilai 4,00 yaitu pada layanan Lalu Lintas Jalan pada unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan selanjutnya tertinggi kedua dengan nilai 3,92 pada layanan Tata Usaha. Posisi selanjutnya atau tertinggi ketiga nilai 3.86 pada layanan Lalu Lintas pada unsur biaya/tarif. Tertinggi ke empat dengan nilai 3.83 pada layanan Tata Usaha pada unsur biaya/tarif

2. Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) memiliki 3 Indikator dimana capaian kinerja indikator-indikator ini dapat menjadi penunjang dalam membantu mencapai Tujuan kinerja Dinas Perhubungan, adapun indikator tersebut yakni ;

➤ Konektivitas Darat

Indikator ini pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 0.58 dengan realisasi sebesar 0.38 Rasio maka dengan begitu capaian kinerja berhasil tercapai 65,5 %, adapun rumus untuk menghitung konektivitas Darat :

$$\text{Konektivitas Darat (IK1)} = \frac{\sum \text{Trayek yang dilayani} \times \text{Bobot Trayek}}{\sum \text{Kebutuhan Trayek}}$$

Berdasarkan formulasi diatas maka pada tahun 2025 rincian perhitungannya adalah sebagai berikut : $12 \times 1 / 32 = 0,38$ keberhasilan program dilihat dari ketersediaan trayek angkutan umum yang terlayani dan dibandingkan dengan kebutuhan, dari data rumus dapat dilihat bahwa trayek yang telah tersedia adalah sebanyak 12 trayek sedangkan kebutuhan adalah sebanyak 32 trayek.

Adapun trayek yang terlayani dan kebutuhan trayek di Kota Samarinda dapat di sajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.15 Data Pelayanan Kebutuhan Trayek Angkutan Jalan

No	Layanan	Trayek Terlayani	Kebutuhan Trayek	Rata-rata Bobot Trayek
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Antar Kota Dalam Kabupaten/Kota	12	32	1
2.	Antar Kota Antar Kabupaten/Kota	-	-	-

Tabel 3.16 Data Rincian Kebutuhan Trayek Kota Samarinda

No	Kode	Rute	Layanan	Frekuensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	A	Pasar Pagi - Sei Kunjang - Loa Bakung - Loa Buah PP	Angkot	>5x seminggu	Tinggi
2	B	Pusat Kota - Jembatan I - Terminal Lempake PP	Angkot	>5x seminggu	Tinggi
3	C	Pasar Pagi - Sempaja - Bayur PP	Angkot	>5x seminggu	Tinggi
4	C1	Perumnas Bengkuring - Jl. Padat Karya - Jl. Wahid Hasyim - Jl.A.Wahab Syahrani - Jl. Ir. Suprpto - Jl. DR. Sutomo - Jl.	Angkot	>5x seminggu	Tinggi

No	Kode	Rute	Layanan	Frekuensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pahlawan - Jl. Kesuma Bangsa - Jl. Agus Salim - Jl. Abul Hasan - Jl. Diponegoro - Jl. P. Sulawesi - Jl. Niaga Barat - Jl. Yos Sodarso - Jl. Gajah Mada - Pasar Pagi - Jl. Gajah Mada - Jl. Cermai - Jl. Mebabu - Jl. Arjuna - Jl. Sudirman - Jl. Awang Long - Jl. Bayangkara - Jl. Pahlawan - Jl. DR. Sutomo - Jl. R. Suprpto - Jl. Ir. H. Juanda - Jl. HA. Wahab Syahrani - Jl. Wahid Hasyim - Jl. Padat Karya - Perumnas Bengkuring PP			
5	C2	Perumnas Bengkuring - Jl. Padat Karya - Jl. Wahid Hasyim - Jl. A. Wahab Syahrani - Jl. Anggur - Jl. KS. Tubun - Jl. Gunung Cermai - Jl. Gajah Mada - Pasar Pagi PP	Angkot	>5x seminggu	Tinggi
6	D	Term. Pasar Segiri - Jl. Pahlawan - Jl. Perniagaan - Jl. AM. Sangaji - Jl. KH. Hasan Basri - Jl. A. Yani - Jl. DI. Panjaitan - Jl. Term. Lempake - dan Benanga PP	Angkot	>5x seminggu	Tinggi
7	E1	Pasar Pagi - Rawa Makmur - Bukuan - Bantuas PP	Angkot	>5x seminggu	Tinggi
8	E2	Term. Pasar Pagi - Jl. Gajah Mada - Jl. RE. Martadinata - Jl. Slamet Riyadi - Jl. U. Suropati - Belok Kiri - Jl. Jemb. Mahakam - Jl. Bung Tomo - Jl. S. Hasanudin - Jl. Patimura - Jl. Palaran - Kel. Rawa Makmur PP	Angkot	>5x seminggu	Tinggi
9	E3	Term. Pasar Pagi - Jl. Gajah Mada - Jl. RE. Martadinata - Jl. Slamet Riyadi - Jl. Untung Suropati - Belok Kiri - Jl. Jemb. Mahakam - Jl. Bung Tomo - Jl. S. Hasanudin - Jl. Patimura - Jl. Palaran - Kel. Bantuas PP	Angkot	>5x seminggu	Tinggi
10	E4	Term. Pasar Pagi - Jl. Gajah Mada - Jl. RE. Martadinata - Jl. Slamet Riyadi - Jl. Untung Suropati - Belok Kiri - Jl. Jemb. Mahakam - Jl. Bung Tomo - Jl. S. Hasanudin - Jl. Patimura - Jl. Palaran - Jl. Gotong Royong - Kel. Simpang Pasir PP	Angkot	>5x seminggu	Tinggi
11	F	Pasar Segiri - Loa Janan Lewat Jl. KS. Tubun / Pasundan PP	Angkot	>5x seminggu	Tinggi
12	G1	Pasar Pagi - Harapan Baru - Loa Janan Ilir PP	Angkot	>5x seminggu	Tinggi
13	G2	Loa Janan - Jl. KS. Tubun / Pasundan - Ps Segiri PP	Angkot	>5x seminggu	Tinggi
14	H1	Pasar Pagi - Sambutan - Sei Kapih -	Angkot	>5x seminggu	Tinggi

No	Kode	Rute	Layanan	Frekuensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Makroman - Sindang Sari - Pulau Atas PP			
15	H2	Sungai Dama - Perum Sambutan PP	Angkot	>5x seminggu	Tinggi
16	I	Pelabuhan - Mangkupalas PP	Angkot	>5x seminggu	Tinggi
17	J	Pasar Segiri - Lewat Jl.Kadrie oening - Ds.Pinang PP	Angkot	>5x seminggu	Tinggi
18	K	Loa Janan Ilir - Smd Seberang PP	Angkot	>5x seminggu	Tinggi
19	L	Term. Pasar Pagi - Rapak Dalam - SMU Plus PP	Angkot	>5x seminggu	Tinggi
20	1A	Pelabuhan Pasar Pagi - Jl. Gajah Mada - Jl.RE.Martadinata - Jl.P.Antasari - Jl.Ir.H.Juanda - Jl.Letjend Suprpto - Jl. Mayjend S Parman - Jl. Ahmad Yani - Jl. DI.Pandjaitan - Terminal Lempake	Bus Dalam Kota	>5x seminggu	Tinggi
21	1B	Pelabuhan Pasar Pagi - Jl. Gajah Mada - Jl. Yos Sudarso - Jl. Niaga Timur - Jl. Pulau Sebatik - Jl. Imam Bonjol - Jl.KH.Ahmad Dahlan - Jl Lambung Mangkurat II - Jl. Pelita - Jl. Kemakmuran - Jl. Sentosa - Jl.DI.Pandjaitan - Terminal Lempake	Bus Dalam Kota	>5x seminggu	Tinggi
22	2A	Terminal Samarinda Seberang – Jl. Bung Tomo – Jl. La Madu keleng – Jl.KH.Harun Nafsi – Jl.APT.Pranoto – Jl. Cipto Mangunkusumo – Jl.Jembatan Mahakam – Jl.Untung Suropati – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Jl. RE.Martadinata – Jl.Gajah Mada – Terminal Pasar Pagi – Jl.Yos sudarso – Jl. Pulau Sebatik – Jl. Jl. Pangeran Hidayatullah – Jl.Jl.Otto Iskandardinata – Jl. Sultan Sulaiman – Jl. Pendekat Mahakam – Jl.Pattimura – Jl. Sultan Hasanudin – Jl. Bung Tomo – Terminal Samarinda Seberang.	Bus Dalam Kota	>5x seminggu	Tinggi
23	2B	Terminal Samarinda Seberang – Jl. Bung Tomo – Jl. Sultan Hasanudi – Jl. Pattimura – Jl. Trikora – Jl. Jembatan Achmad Amin – Jl. Kapten Sudjono Aj – Jl. Pendekat Mahkota – Jl. Sultan Sulaiman – Jl. Otto Iskandar Dinata – Jl. Pesut – Jl. Mulawarman – Jl. Panglima Batur – Jl. KH Khalid – Jl. Gajah Mada – Terminal Pasar Pagi – Jl. Gajah Mada – Jl. RE Martadinata – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Untung Suropati – Terminal Singai Kunjang – Jl. Untung Suropati – Jl. Jembatan Mahakam – Jl. Cipto	Bus Dalam Kota	>5x seminggu	Tinggi

No	Kode	Rute	Layanan	Frekuensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Mangunkusumo – Jl. Apt Pranoto – Jl. KH Harun Nafsi – Jl. HOS Cokroaminoto – Jl. Bung Tomo – Terminal Samarinda Seberang.			
24	3A	Terminal Pasar Pagi – Jl. Gajah Mada – Jl. RE Martadinata – Jl. P Antasari – Jl. P Suryanata – Jl. Ringroad Utara – Jl. KH Wahid Hasyim 2 – Jl. PM Noor – Jl. DI Pandjaitan – Jl. Bontang Samarinda – Jl. Mayjend S Parman – Jl. Dr Sutomo – Jl. Pahlawan – Jl. Bhayangkara – Jl. Awang Long – Jl. Jend Sudirman – Jl. Gajah Mada – Terminal Pasar Pagi.	Bus Dalam Kota	>5x seminggu	Tinggi
25	3B	Terminal Pasar Pagi – Jl. Gajah Mada – Jl. Yos Sudarso – Jl. Pulau Sebatik – Jl. Basuki Rahmat – Jl. Bhayangkara – Jl. Pahlawan – Jl. Dr Sutomo – Jl. Mayjend S Parman – Jl. Bontang Samarinda – Jl. DI Pandjaitan – Jl. PM Noor – Jl. KH Wahid Hasyim 2 –	Bus Dalam Kota	>5x seminggu	Tinggi
26	4	Terminal Lempake – Jl. Bontang Samarinda – Bandara Internasional APT Pranoto – PP	Bus Dalam Kota	>5x seminggu	Tinggi
27	F1	Jl. P. Suryanata – Jl. Kadrie Oening – Jl. A. Wahab Syahrani – Jl. KH. Wahid Hasyim 2 – Jl. Padat Karya – Jl. KH. Wahid Hasyim 2 - Jl. A. Wahab Syahrani - Jl. Kadrie Oening - Jl. P. Suryanata	Bus Dalam Kota	>5x seminggu	Tinggi
28	F2	Jl. Pahlawan – Jl. Bhayangkara – Jl. Awang Long – Jl. Gajah Mada – Jl. Gn. Cermi – Jl. Pasundan – Jl. Anggur – Jl. Jend. Suprpto - Jl. A. Wahab Syahrani - Jl. Wahid Hasyim 1 - Jl. M yamin – Jl. Dr. Sutomo - Jl. Pahlawan	Bus Dalam Kota	>5x seminggu	Tinggi
29	F3	Jl. Mulawarman – Jl. Panglima Batur – Jl. KH. Khalid – Jl. KH. Abul Hasan – Jl. KH. Agus Salim – Jl. A.M Sangaji – Jl. Hasan Basri – Jl. Ahmad Yani – Jl. Jend. Sutoyo – Jl. Kemakmuran – Jl. Pelita – Jl. Merdeka – Jl. Urip Sumoharjo - Jl. Biawan – Jl. Arief Rahman Hakim - Jl. Aminah Syukur – Jl. P. Hidayatullah – Jl. P Irian – Jl. Mulawarman	Bus Dalam Kota	>5x seminggu	Tinggi
30	F4	Jl. Mulawarman – Jl. Sebatik - Jl. Imam Bonjol – Jl. Arief Rahman Hakim – Jl.	Bus Dalam Kota	>5x seminggu	Tinggi

No	Kode	Rute	Layanan	Frekuensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Biawan – Jl. Urip Sumoharjo - Jl. Merdeka – Jl. Pelita – Jl. Kemakmuran – Jl. Jend. Sutoyo – Jl. Ahmad Yani – Jl. S. Parman – Jl. Gatot Subroto - Jl. KH. Agus Salim - Jl. KH. Abul Hasan – Jl. Pangeran Diponegoro – Jl. Pangeran Hidayatullah – Jl. Pangeran Suriansyah – Jl. Mulawarman			
31	F5	Pasar Kemuning – Jl. Jakarta – Jl. KH. Mas Mansyur – Jl. Untung Suropati – Jl. Ir. Sutami – Jl. Teuku Umar – Jl. MT Haryono – Jl. Juanda –Jl. MT Haryono - Jl. Teuku Umar - Jl. Ir. Sutami - Jl. Untung Suropati - Jl. KH. Mas Mansyur - Jl. Jakarta - Pasar Kemuning.	Bus Dalam Kota	>5x seminggu	Tinggi
32	F6	Terminal Samarinda Seberang – Jl. Bung Tomo – Jl. Sultan Hassanuddin - Jl. KH Harin Nafsi – Jl. H.A.M Rifaddin – UINSI Samarinda – Jl. Moeis Hasan – Bundaran Jembatan Mahakan Ulu - Jl. Moeis Hasan - Jl. H.A.M Rifaddin – Jl. Syahrani Dahlan - Jl. Cipto Mangunkusumo – Jl. Bung Tomo – Terminal Samarinda Seberang.	Bus Dalam Kota	>5x seminggu	Tinggi

Adapun data trayek yang dilayani sebagai berikut :

Tabel 3.17 Data trayek yang di layani

No	Kode	Rute	Layanan	Frekuensi	Keterangan	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	A	Pasar Pagi - Sei Kunjang - Loa Bakung - Loa Buah PP	Angkot	>5x seminggu	Tinggi	1
2	B	Pusat Kota - Jembatan I - Terminal Lempake PP	Angkot	>5x seminggu	Tinggi	1
3	C	Pasar Pagi - Sempaja - Bayur PP	Angkot	>5x seminggu	Tinggi	1
4	C1	Perumnas Bengkuring - Jl. Padat Karya - Jl. Wahid Hasyim - Jl.A.Wahab Syahrani - Jl.r.Suprpto - Jl.DR.Sutomo - Jl.Pahlawan - Jl.Kesuma Bangsa - Jl.Agus Salim - Jl.Abul Hasan - Jl.Diponegoro - Jl.P.Sulawesi - Jl.Niaga Barat - Jl.Yos Sodarso - Jl.Gajah Mada - Pasar Pagi - Jl. Gajah Mada - Jl. Cermat - Jl. Mebabu - Jl. Arjuna - Jl. Sudirman - Jl. Awang Long - Jl. Bayangkara - Jl. Pahlawan - Jl. DR.Sutomo -	Angkot	>5x seminggu	Tinggi	1

No	Kode	Rute	Layanan	Frekuensi	Keterangan	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Jl.R.Suprpto - Jl. Ir.H.Juanda - Jl.HA.Wahab Syahrani - Jl.Wahid Hasyim - Jl. Padat Karya - Perumnas Bengkuring PP				
5	C2	Perumnas Bengkuring - Jl. Padat Karya - Jl. Wahid Hasyim - Jl.A.Wahab Syahrani - Jl. Anggur - Jl. KS.Tubun - Jl. Gunung Cermai - Jl. Gajah Mada - Pasar Pagi PP	Angkot	>5x seminggu	Tinggi	1
6	E	Pasar Pagi - Rawa Makmur - Bukuan - Bantuas PP	Angkot	>5x seminggu	Tinggi	1
7	E3	Term.Pasar Pagi - Jl. Gajah Mada - Jl.RE.Martadinata - Jl.Slamet Riyadi - Jl.Untung Suropati - Belok Kiri Jl.Jemb.Mahakam - Jl.Bung Tomo - Jl.S.Hasanudin - Jl.Patimura - Jl.Palaran - Kel.Bantuas PP	Angkot	>5x seminggu	Tinggi	1
8	E4	Term.Pasar Pagi - Jl. Gajah Mada - Jl.RE.Martadinata - Jl.Slamet Riyadi - Jl.Untung Suropati - Belok Kiri Jl.Jemb.Mahakam - Jl.Bung Tomo - Jl.S.Hasanudin - Jl.Patimura - Jl.Palaran - Jl.Gotong Royong - Kel.Simpang Pasir PP	Angkot	>5x seminggu	Tinggi	1
9	G1	Pasar Pagi - Harapan Baru - Loa Janan Ilir PP	Angkot	>5x seminggu	Tinggi	1
10	G2	Loa Janan - Jl.KS.Tubun / Pasundan - Ps Segiri PP	Angkot	>5x seminggu	Tinggi	1
11	I	Pelabuhan - Mangkupalas PP	Angkot	>5x seminggu	Tinggi	1
12	K	Loa Janan Ilir - Smd Seberang PP	Angkot	>5x seminggu	Tinggi	1

➤ **Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal**

Indikator ini pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 40% dan target tersebut terealisasi sebesar 40,92%. maka dengan begitu capaian kinerja berhasil tercapai 100 %, adapun formulasi untuk menghitung persentase kelengkapan jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal :

$$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{Kelengkapan Jalan Terpasang}}{\sum \text{Kebutuhan Kelengkapan Jalan}} \times 100\%$$

Melihat dari tabel diatas yang menunjukkan realisasi Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang dari tahun ke tahun cenderung naik dikarenakan tercukupinya anggaran yang ada di setiap tahunnya.

Realisasi sarana dan prasarana perhubungan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, hal ini merupakan upaya menjamin ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas jalan yang dilaksanakan melalui pengembangan fasilitas perlengkapan jalan. Hal ini sejalan dengan semakin banyaknya kegiatan yang membutuhkan jasa transportasi maka menyebabkan bertambahnya intensitas pergerakan lalu lintas.

Adapun Perlengkapan jalan yang terpasang pada tahun 2025 oleh Dinas Perhubungan yaitu :

Tabel 3.18 Perlengkapan Jalan yang terpasang

No	Jenis Perlengkapan Jalan	Perlengkapan Jalan yang Terpasang s/d Tahun 2024	Perlengkapan Jalan yang Terpasang Tahun 2025	Perlengkapan Jalan yang Terpasang	Kebutuhan	Satuan	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)/(6)x100
1	LPJU	2680	1361	4041	12800	Tiang	31,57
2	Rambu-Rambu	378	260	638	1006	Unit	63,42
3	Marka Jalan	4437	6284	10721	110721	M2	9,68
4	APILL	38	0	38	48	Lokasi	79,17
5	ZOSS	37	7	44	80	Lokasi	55,00
6	Guardrail	20	0	20	300	M	6,67
Persentase Prasarana Kondisi Ideal							40,92

Analisis Keberhasilan persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang dalam kondisi ideal ini di pengaruhi beberapa faktor antara lain:

- Perencanaan kebutuhan yang tepat sasaran
Penentuan lokasi pemasangan perlengkapan jalan dilakukan berdasarkan hasil survei lapangan, analisis kebutuhan lalu lintas, serta prioritas pada titik rawan kecelakaan dan kawasan dengan volume lalu lintas tinggi.
- Dukungan anggaran dan ketersediaan sarana
Alokasi anggaran yang memadai serta dukungan pengadaan sarana prasarana memungkinkan seluruh rencana pemasangan perlengkapan jalan dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
- Pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu
Proses pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga tidak terjadi penundaan kegiatan yang dapat mempengaruhi capaian kinerja tahunan

- Koordinasi dan pengawasan yang efektif
Adanya koordinasi yang baik antara perangkat daerah terkait penyediaan jasa serta pengawasan teknis di lapangan memastikan kualitas pemasangan sesuai standar teknis.
- Komitmen terhadap peningkatan keselamatan lalu lintas
Fokus terhadap kebijakan pada peningkatan keselamatan dan ketertiban lalu lintas mendorong optimalisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga berdampak langsung pada meningkatnya jumlah dan kualitas perlengkapan jalan yang terpasang.

➤ **Persentase Kendaraan Layak Uji**

Indikator ini pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 53% dan target tersebut terealisasi sebesar 47,3% maka dengan begitu capaian kinerja tercapai 89,3%, adapun formulasi untuk menghitung indikator ini yaitu :

$$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{Kendaraan Taat Uji}}{\sum \text{Kendaraan Wajib Uji}} \times 100\%$$

Berdasarkan formulasi diatas maka pada tahun 2025 rincian perhitungan Persentase kendaraan layak uji adalah sebagai berikut : **16.398 /34.630 x 100 = 47,3%**.

Adapun Tabel perhitungan kendaraan layak uji terlampir dibawah ini :

Tabel 3.19 Persentase Kendaraan Layak Uji

No	Indikator	Wajib Uji	Satuan	Triwulan	Realisasi	Total Realisasi/ Taat Uji	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(3)x100
1	Kendaraan	34.630	Unit	TW I	4.242	16.398	47,35%
				TW II	3.880		
				TW III	4.248		
				TW IV	4.028		

Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya tingkat kepatuhan uji berkala kendaraan atau belum optimalnya capaian indikator tersebut antara lain:

- Tidak adanya pengawasan yang konsisten di lapangan
- Belum diterapkannya denda atas keterlambatan uji berkala

- Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan akan pentingnya uji berkala kendaraan bermotor (KIR) sebagai aspek keselamatan dan kelayakan kendaraan, meskipun saat ini pelayanan uji KIR sudah tidak dikenakan biaya.

3. Program Pengelolaan Pelayaran

Program Pengelolaan Pelayaran dengan indikator Konektivitas Sungai pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 0.57 dan target tersebut terealisasi sebesar 0,57 maka dengan begitu capaian kinerja berhasil tercapai 100 %, adapun rumus untuk menghitung Rasio konektivitas Sungai yakni :

$$\text{Konektivitas Sungai (IK2)} = \frac{\sum \text{Lintas Penyeberangan yang Beroperasi} \times \text{Bobot Lintas SDP}}{\sum \text{Kebutuhan Lintas Penyeberangan}}$$

Berdasarkan formulasi diatas pada tahun 2025 rincian perhitungannya adalah sebagai berikut : $(4 \times 1) / 7 = 0,57$, keberhasilan program dilihat dari ketersediaan jumlah lintasan penyeberangan yang beroperasi dibandingkan dengan jumlah kebutuhan lintasan, dari data rumus dapat dilihat bahwa lintasan penyeberangan yang telah tersedia adalah sebanyak 4 lintasan sedangkan kebutuhan adalah sebanyak 7 Lintasan.

Tabel 3.20 Data Pelayanan Kebutuhan Lintas Angkutan Sungai

No	Lintasan	Jalur	Frekuensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dalam Kota	Pasar Pagi - Samarinda Seberang	>5x Seminggu	Tinggi
2.	Dalam Kota	Pasar Pagi - Mangkupalas	>5x Seminggu	Tinggi
3.	Dalam Kota	Pasar Pagi - Batang Aji	>5x Seminggu	Tinggi
4.	Dalam Kota	Samarinda Seberang - Pasar Pagi	>5x Seminggu	Tinggi
5.	Dalam Kota	Loa Janan - Loa Kumbar	>5x Seminggu	Tinggi
6.	Dalam Kota	Pasar Pagi - Loa Kumbar	>5x Seminggu	Tinggi
7.	Dalam Kota	Pasar Pagi - Karang Mumus	>5x Seminggu	Tinggi

Adapun data rincian yang dilayani sebagai berikut :

Tabel 3.21 Data Rincian Lintas yang Dilayani

No	Lintasan	Jalur	Frekuensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dalam Kota	Pasar Pagi - Samarinda Seberang	>5x Seminggu	Tinggi
2.	Dalam Kota	Pasar Pagi - Mangkupalas	>5x Seminggu	Tinggi
3.	Dalam Kota	Pasar Pagi - Batang Aji	>5x Seminggu	Tinggi
4.	Dalam Kota	Samarinda Seberang - Pasar Pagi	>5x Seminggu	Tinggi

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain:

- Adanya Pemenuhan sarana dan prasarana kedermagaan dengan dilaksanakannya pemeliharaan serta rehabilitasi bangunan
- Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan.

Tabel 3.22 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Program			Kinerja Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	IKM NILAI AKIP	87,48 75,75	85,14 79	Sangat Tinggi	54.346.749.609,00	52.673.222.637,00	Sangat Tinggi
Perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	100%	100%	Sangat Tinggi	221.556.000,00	218.803.730,00	Sangat Tinggi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	17 Dokumen	17 Dokumen	Sangat Tinggi	138.829.500,00	138.281.000,00	Sangat Tinggi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Sangat Tinggi	41.152.750,00	39.868.471,00	Sangat Tinggi
Evaluasi kinerja perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	4 Laporan	Sangat Tinggi	41.573.750,00	40.654.259,00	Sangat Tinggi
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampau dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	-	-	0,00	0,00	-
Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan	1 Laporan	1 Laporan	Sangat Tinggi	23.946.110.055,00	22.180.654.992,00	Sangat Tinggi
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	111 Pegawai	111 Pegawai	Sangat Tinggi	16.228.934.305,00	15.108.087.564,00	Sangat Tinggi
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	Sangat Tinggi	7.670.507.000,00	7.025.916.593,00	Sangat Tinggi
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Sangat Tinggi	46.668.750,00	46.650.835,00	Sangat Tinggi
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Sangat Tinggi	37.680.939,00	35.291.487,00	Sangat Tinggi

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Program			Kinerja Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Sangat Tinggi	18.802.514,00	17.571.971,00	Sangat Tinggi
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Sangat Tinggi	18.878.425,00	17.719.516,00	Sangat Tinggi
Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah laporan	1 Laporan	1 Laporan	Sangat Tinggi	1.470.070.698,00	1.440.204.415,00	Sangat Tinggi
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Paket	5 Paket	Sangat Tinggi	61.080.400,00	61.071.386,00	Sangat Tinggi
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	5 Paket	Sangat Tinggi	760.202.000,00	735.100.800,00	Sangat Tinggi
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 Paket	5 Paket	Sangat Tinggi	27.940.000,00	27.940.000,00	Sangat Tinggi
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	5 Paket	Sangat Tinggi	356.692.150,00	356.534.762,00	Sangat Tinggi
Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan	4 Laporan	Sangat Tinggi	43.770.000,00	43.770.000,00	Sangat Tinggi
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Sangat Tinggi	220.386.148,00	197.787.467,00	Sangat Tinggi
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	4 Laporan	4 Laporan	Sangat Tinggi	1.511.010.000,00	1.429.552.428,00	Sangat Tinggi
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	2 Unit	Sangat Tinggi	1.011.075.000,00	941.930.988,00	Sangat Tinggi
Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Unit	5 Unit	Sangat Tinggi	499.935.000,00	487.621.440,00	Sangat Tinggi
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan penyedia jasa	4 Laporan	4 Laporan	Sangat Tinggi	25.980.714.017,00	26.203.766.418,00	Sangat Tinggi
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	4 Laporan	Sangat Tinggi	25.868.934.017,00	26.092.266.418,00	Sangat Tinggi
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan	4 Laporan	Sangat Tinggi	111.780.000,00	111.500.000,00	Sangat Tinggi

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Program			Kinerja Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan pemeliharaan	4 Laporan	4 Laporan	Sangat Tinggi	1.179.607.900,00	1.164.949.167,00	Sangat Tinggi
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30 Unit	30 Unit	Sangat Tinggi	848.744.900,00	834.890.551,00	Sangat Tinggi
Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Sangat Tinggi	139.624.000,00	139.285.040,00	Sangat Tinggi
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Sangat Tinggi	191.239.000,00	190.773.576,00	Sangat Tinggi
Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat	0,58	0,38	Sedang	53.780.417.949,00	52.617.048.258,00	Sangat Tinggi
Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah perlengkapan jalan tersedia	7 Unit	7 Unit	Sangat Tinggi	47.099.709.949,00	47.031.073.872,00	Sangat Tinggi
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten/kota yang terbangun	1 Unit	1 Unit	Sangat Tinggi	76.430.000,00	48.773.000,00	Sedang
Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten / kota yang tersedia	7 Unit	7 Unit	Sangat Tinggi	43.533.609.042,00	43.532.886.026,00	Sangat Tinggi
Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	1 Unit	Sangat Tinggi	500.000.000,00	498.148.178,00	Sangat Tinggi
Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan Terpelihara	7 Unit	7 Unit	Sangat Tinggi	2.989.670.907,00	2.716.054.830,00	Sangat Tinggi
Pengelolaan terminal penumpang tipe C	Jumlah terminal tipe C terkelola	1 Unit	-	-	0	0,00	-
Pembangunan gedung terminal Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas Penunjang	1 Unit	-	-	0	0,00	-
Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Jumlah fasilitas parkir tersedia	4 Laporan	4 Laporan	Sangat Tinggi	3.875.107.302,00	2.941.581.085,00	Tinggi
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten /kota	4 Laporan	4 Laporan	Sangat Tinggi	3.875.107.302,00	2.941.581.085,00	Tinggi

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Program			Kinerja Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	4 Laporan	4 Laporan	Sangat Tinggi	1.922.520.000,00	1.789.734.927,00	Sangat Tinggi
Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten / kota	4 Laporan	4 Laporan	Sangat Tinggi	1.0448.588.000,00	1.440.971.382,00	Sangat Tinggi
Sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/ kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Sangat Tinggi	214.602.500,00	186.016.257,00	Sangat Tinggi
Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	Sangat Tinggi	60.600.000,00	55.101.363,00	Sangat Tinggi
Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	Sangat Tinggi	198.729.500,00	107.645.925,00	Rendah
Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin	4 Laporan	4 Laporan	Sangat Tinggi	99.107.500,00	95.435.586,00	Sangat Tinggi
Pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin	Jumlah laporan rekomendasi persetujuan teknis Andalalin yang terawasi	4 Laporan	4 Laporan	Sangat Tinggi	99.107.500,00	95.435.586,00	Sangat Tinggi
Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	4 Laporan	4 Laporan	Sangat Tinggi	444.869.750,00	437.833.515,00	Sangat Tinggi
Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan Terminal	Jumlah laporan inspeksi, Audit dan pemantauan terminal	4 laporan	4 laporan	Sangat Tinggi	0,00	0,00	Sangat Tinggi
Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	4 Laporan	4 Laporan	Sangat Tinggi	250.717.500,00	252.031.545,00	Sangat Tinggi
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 Laporan	-	-	0,00	0,00	-
Peningkatan kapasitas auditor dan inspektur LLAJ	Jumlah auditor dan inspektur lalu lintas dan angkutan jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	8 Orang	8 Orang	Sangat Tinggi	129.716.000,00	128.547.510,00	Sangat Tinggi

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Program			Kinerja Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pelaksanaan pengawasan melalui uji petik terhadap unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor	Jumlah laporan uji petik terhadap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	4 Laporan	4 Laporan	Sangat Tinggi	64.181.250,00	57.254.460,00	Sangat Tinggi
Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia	1 Laporan	1 Laporan	Sangat Tinggi	90.181.000,00	89.190.966,00	Sangat Tinggi
Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan / atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten /kota	1 Laporan	1 Laporan	Sangat Tinggi	90.181.000,00	89.190.966,00	Sangat Tinggi
Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah armada angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah	8 Unit	-		0,00	0,00	-
Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan	1 Dokumen	1 Dokumen	Sangat Tinggi	113.368.625,00	111.412.475,00	Sangat Tinggi
Pengendalian Pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Sangat Tinggi	0,00	111.412.475,00	Sangat Tinggi
Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan kebijakan dan tersosialisasinya rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	1 Dokumen	-	-	113.368.625,00	0,00	-
Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah/kota	Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang	4 Laporan	4 Laporan	Sangat Tinggi	135.553.500,00	120.785.832,00	Sangat Tinggi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek	-	-	-	0,00	0,00	-

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Program			Kinerja Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah laporan pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten / kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	4 Laporan	4 Laporan	Sangat Tinggi	135.553.500,00	120.785.832,00	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Pelayaran	Konektivitas sungai	0.57	0.57	Sangat Tinggi	4.982.151.750,00	4.771.361.231,00	Sangat Tinggi
Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	Sangat Tinggi	80.605.500,00	7.645.000,00	Sangat Rendah
Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan kabupaten / kota	1 Laporan	1 Laporan	Sangat Tinggi	80.605.500,00	7.645.000,00	Sangat Rendah
Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan	4 Laporan	4 Laporan	Sangat Tinggi	138.814.000,00	138.145.648,00	Sangat Tinggi
Pengendalian dan pengawasan jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam kabupaten/kota	Jumlah laporan Pengendalian dan pengawasan jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	4 Laporan	4 Laporan	Sangat Tinggi	138.814.000,00	138.145.648,00	Sangat Tinggi
Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau	Jumlah dokumen penetapan rencana induk DLKR/DL KP pelabuhan sungai	1 Dokumen	1 Dokumen	Sangat Tinggi	496.835.000,00	494.990.994,00	Sangat Tinggi

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Program			Kinerja Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau	Jumlah dokumen rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR) / daerah lingkungan kepentingan (DLKP) pelabuhan sungai dan danau	1 Dokumen	1 Dokumen	Sangat Tinggi	496.835.000,00	494.990.994,00	Sangat Tinggi
Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	4 Laporan	4 Laporan	Sangat Tinggi	4.265.897.250,00	4.130.579.589,00	Sangat Tinggi
Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	Jumlah pelabuhan sundai dan danau yang beroperasi dan terpelihara	1 Unit	1 Unit	Sangat Tinggi	296.488.000,00	263.048.721,00	Sangat Tinggi
Pembangunan Dermaga sungai dan danau	Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang dibangun	1 Unit	1 Unit	Sangat Tinggi	2.918.193.250,00	2.871.639.119,00	Sangat Tinggi
Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah dermaga sungai dan danau yang dipelihara	4 Unit	4 Unit	Sangat Tinggi	733.528.000,00	730.427.380,00	Sangat Tinggi
Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau penyeberangan	Jumlah fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau penyeberangan	5 Unit	5 Unit	Sangat Tinggi	317.688.000,00	265.464.369,00	Sangat Tinggi
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan	32.428 Unit	16.398 Unit	Sedang	2.671.735.000,00	2.471.393.046,00	Sangat Tinggi
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	151 Unit	151 Unit	Sangat Tinggi	975.281.000,00	957.851.485,00	Sangat Tinggi
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala	Jumlah sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya	16 Orang	16 Orang	Sangat Tinggi	190.728.000,00	187.994.995,00	Sangat Tinggi
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	2000 Unit	2000 Unit	Sangat Tinggi	100.000.000,00	99.546.737,00	Sangat Tinggi
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	20.000 Dokumen	16.398 Dokumen	Sangat Tinggi	80.726.000,00	79.106.874,00	Sangat Tinggi
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor	4 Laporan	4 Laporan	Sangat Tinggi	100.000.000,00	90.473.570,00	Sangat Tinggi
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	85 Unit	85 Unit	Sangat Tinggi	1.225.000.000,00	1.056.419.385,00	Sangat Tinggi

B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran belanja Dinas Perhubungan Kota Samarinda sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025 (DPA-P) Sebesar Rp. 115.781.053.985,-. Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan data pada tabel berikut ini :

Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Berdasarkan DPA-P Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	54.346.749.609,00	52.673.222.637,00	96,92%
-	Perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	221.556.000,00	218.803.730,00	98,76%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	138.829.500,00	138.829.500,00	99,60%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.152.750,00	39.868.471,00	96,88%
3	Evaluasi kinerja perangkat Daerah	41.573.750,00	40.654.259,00	97,79%
4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0%
-	Administrasi keuangan perangkat daerah	23.946.110.055,00	22.180.654.992,00	97,%
5	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	16.228.934.305,00	15.108.087.564,00	97,79%
6	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	7.670.507.000,00	7.025.916.593,00	97,82%
7	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	46.668.750,00	46.650.853,00	100,00%
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	37.680.939,00	35.291.487,00	93,66%
8	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	18.802.514,00	17.571.971,00	93,66%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	18.878.425,00	17.719.516,00	93,86%
-	Administrasi umum perangkat daerah	1.470.070.698,00	1.440.204.415,00	97,97%
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	61.080.400,00	61.071.389,00	99,99%
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	760.202.000,00	735.100.800,00	96,70%
12	Penyediaan bahan logistik kantor	27.940.000,00	27.940.000,00	100%
13	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	356.692.150,00	356.534.762,00	99,96%
14	Fasilitasi kunjungan tamu	43.770.000,00	43.770.000,00	100,0%
15	Peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	220.386.148,00	197.787.467,00	89,75%
-	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.511.010.000,00	1.429.552.428,00	94,61%
16	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1.011.075.000,00	941.930.988,00	93,16%
17	Pengadaan mebel	499.935.000,00	487.621.440,00	97,54%
-	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	26.314.308.790,00	26.203.766.418,00	98,07%
18	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	26.202.528.790,00	26.092.266.418,00	98,06%
19	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	111.780.000,00	111.500.000,00	99,75%
-	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.179.607.900,00	1.164.949.167,00	98,76%
20	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	848.744.900,00	834.890.551,00	98,37%
21	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	139.624.000,00	139.285.040,00	99,76%
22	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	191.239.000,00	190.773.576,00	99,76%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
II.	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	53.780.417.626,00	51.774.364.889,00	98,90%
-	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	47.099.709.949,00	47.031.073.872,00	99,85%
23	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	76.430.000,00	48.773.000,00	63,81%
24	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	43.533.609.042,00	43.532.886.026,00	100,0%
25	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	500.000.000,00	498.184.178,00	99,63%
26	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	2.989.670.907,00	2.716.054.830,00	90,85%
-	Pengelolaan terminal penumpang tipe C	0,00	0,00	0,00%
27	Pembangunan gedung terminal Tipe C	0,00	0,00	0,00%
-	Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	3.875.107.302,00	2.941.581.085,00	75,91%
28	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	3.875.107.302,00	2.941.581.085,00	75,91%
-	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	1.922.520.000,00	1.789.734.972,00	93,09%
29	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.448.588.000,00	1.440.971.382,00	99,47%
30	Sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	214.602.500,00	186.016.257,00	86,68%
31	Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	60.600.000,00	55.101.363,00	90,93%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	198.729.500,00	107.645.925,00	54,17%
-	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota	99.107.500,00	95.435.586,00	96,30%
33	Pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin	99.107.500,00	95.435.586,00	96,30%
-	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	444.869.750,00	437.833.515,00	98,42%
34	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan Terminal	0,00	0,00	
35	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/ kota	250.717.500,00	252.031.545,00	100,52%
36	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0,00	0,00	
37	Peningkatan kapasitas auditor dan inspektur LLAJ	129.716.000,00	128.547.510,00	99,10%
38	Pelaksanaan pengawasan melalui uji petik terhadap unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	64.436.250,00	57.254.460,00	88,85%
-	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	90.181.000,00	89.190.966,00	98,90%
39	Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	90.181.000,00	89.190.966,00	93,93%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	0,00	0,00	
-	Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	113.368.625,00	111.412.475,00	98,27%
41	Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	113.368.625,00	111.412.475,00	98,27%
42	Pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	0,00	0,00	
-	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah/kota	135.553.500,00	120.785.832,00	89,11%
43	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	
44	Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	135.553.500,00	120.785.832,00	89,11%
III.	Program Pengelolaan Pelayaran	4.982.151.750,00	4.771.361.231,00	95,77%
-	Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota	80.605.500,00	7.645.000,00	99,80%
45	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan kabupaten/kota	80.605.500,00	7.645.000,00	99,52%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	138.814.000,00	138.145.648,00	99,52%
46	Pengendalian dan pengawasan jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	138.814.000,00	138.145.648,00	99,52%
-	Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau	496.835.000,00	494.990.994,00	99,63%
47	Pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau	496.835.000,00	494.990.994,00	99,63%
-	Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	4.265.897.250,00	4.130.579.589,00	96,83%
48	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	296.488.000,00	263.048.721,00	88,72%
49	Pembangunan dermaga sungai dan danau	2.918.193.250,00	2.918.193.250,00	98,40%
50	Pemeliharaan dermaga sungai dan danau	733.528.000,00	730.427.380,00	99,58%
51	Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau penyeberangan Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	317.688.000,00	265.464.369,00	83,56%
-	Pengujian berkala kendaraan bermotor	2.671.735.000,00	2.471.393.046,00	92,50%
52	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	975.281.000,00	957.851.485,00	98,21%
53	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	190.728.000,00	187.994.995,00	98,57%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
31	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	99.546.737,00	99,55%
32	Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	80.726.000,00	79.106.874,00	97,99%
33	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	90.473.570,00	90,47%
34	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	1.225.000.000,00	1.056.419.385,00	86,24%
Total		115.781.053.985,00	112.533.025.172,00	97,19%

C. MATRIK PENILAIAN KINERJA ORGANISASI (PKO)

Tabel 3.24 Matrik penilaian kinerja organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))
1	Meningkatkan Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi	Rasio Konektivitas	57,67	43,7	75,78%	75,78%	10%	68,20%
	Total Capaian PK (4)							68,20%
	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)							68,20%
	Predikat PKO (6)							Butuh Perbaikan

Berdasarkan tabel hasil pengukuran kinerja organisasi, diketahui bahwa capaian kinerja indikator belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang berdampak pada tertundanya beberapa program integrasi moda transportasi, namun secara agregat nilai kinerja organisasi masih berada pada **kategori Butuh Perbaikan**, dimana kinerja organisasi telah berjalan namun belum sepenuhnya efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perhubungan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai mana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda tahun 2025 – 2029 dan dokumen perencanaan lainnya.

LKjIP Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. sebagai instansi sektor perhubungan Dinas Perhubungan Kota Samarinda berusaha memaksimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun anggaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan serta berusaha untuk memanfaatkan sumber daya tersebut dengan efektif dan efisien, meskipun demikian dinas perhubungan berusaha untuk bertanggung jawab mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan

Hasil Pengukuran terhadap indikator kinerja pencapaian sasaran utama urusan perhubungan tahun 2025 yaitu :

Meningkatnya kualitas keselamatan dan kualitas layanan transportasi dengan indikator Rasio Konektivitas dari target 57,67 dengan realisasi 43,7 dengan begitu maka capaian kinerja menurut permendagri nomor 86 tahun 2017 capaian kinerja berkategori “Tinggi” namun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Anggaran yang dialokasikan pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebesar Rp. 115.781.053.985,- (*seratus lima belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima*) terbagi dalam 3 Program 20 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan dengan realisasi penyerapan anggaran tercapai 97,19%.

Adapun kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran tersebut :

- Berkurangnya minat masyarakat terhadap penggunaan jasa angkutan umum
- Perlunya peningkatan dan pembinaan kepada para pemilik pengusaha serta operator lapangan dalam peningkatan kualitas pelayanan bagi angkutan umum agar dapat berkompetisi dalam persaingan pasar yang sehat.
- Koneksitas terhadap jaringan pelayanan angkutan umum yang belum terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dengan baik sehingga berdampak pada pemborosan waktu, biaya dan kondisi lainnya.

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam pengawasan teknis baik di transportasi jalan raya maupun transportasi sungai.

Berdasarkan hal-hal di atas maka Dinas perhubungan akan mengambil langkah-langkah dalam mendukung peningkatan rasio konektivitas yakni :

- Memperbaiki kondisi armada dan mengintegrasikan transportasi umum dengan moda lain (Angkutan Massal).
- Mensosialisasikan manfaat dan dampak positif angkutan massal dan mengajak *Stake Holder* untuk ikut berpartisipasi.
- Pengusulan dukungan anggaran secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pengembangan konektivitas.
- Penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya maupun swasta dalam rangka pelayanan transportasi.
- Mengembangkan kompetensi dan kualitas, efisiensi atau efektifitas dari proses kerja serta mencari dan menerapkan cara-cara (ide, solusi, metode) baru untuk meningkatkan hasil dan proses kerja.

Dengan demikian, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik, serta menjadikan laporan ini sebagai acuan untuk perbaikan yang berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025 ini, dengan harapan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai tolok ukur, media evaluasi, monitoring dan laporan data/informasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang dan juga digunakan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan dan kinerja serta segala permasalahan pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan berikutnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PERHUBUNGAN

Jalan MT. Haryono, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda
Kalimantan Timur Kode Pos 75124

<https://dishub.samarinda.go.id>

Email : dishub@samarindakota.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HMT MANALU, S.SiT, M.Sc
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : ANDI HARUN
Jabatan : WALIKOTA SAMARINDA

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,



ANDI HARUN

Pihak Pertama,



HMT MANALU, S.Si.T, M.Sc
NIP. 19770328 200012 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	Persentase Capaian Kinerja Program Dinas Perhubungan	100 %
2	Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	0.47

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 55.251.514.158
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 59.099.112.063
3. Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 5.039.681.000
4. Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp 795.518.000
JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2025	Rp 120.185.825.221

Samarinda, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,



ANDI HARUN

Pihak Pertama,



HMT MANAJU, S.Si.T, M.Sc
NIP. 19770328 200012 1 001

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HMT MANALU, S.SiT., M.Sc

Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*,

Nama : ANDI HARUN

Jabatan : WALIKOTA SAMARINDA

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 Nopember 2025

Pihak Kedua,


ANDI HARUN

Pihak Pertama,


HMT MANALU, S.SiT., M.Sc
NIP. 19770328 200012 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi	Rasio Konektivitas	%	57,67

	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 54.346.749.609
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 56.452.152.626
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 4.982.151.750
	Jumlah Anggaran	Rp 115.781.053.985

Samarinda, 10 Nopember 2025

Pihak Kedua,





ANDI HARUN

Pihak Pertama,





HMT MANALU, S.SiT., M.Sc
NIP. 19770328 200012 1 001

LAMPIRAN III
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan MT. Haryono Telp. (0541) 748537 - Fax (0541) 741636
SAMARINDA

Kode Pos. 75124

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025 - 2029

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	DASAR HUKUM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi	Rasio Konektivitas	Nilai	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Rasio konektivitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keterhubungan atau aksesibilitas suatu wilayah. Rasio konektivitas kota dihitung dengan membagi jumlah trayek yang melayani suatu kota dengan jumlah kebutuhan trayek dikota tersebut	IK1 X Bobot angkutan jalan + IK2 X Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Samarinda, 4 Agustus 2025

Kepala Dinas,



HMT MANALU, S.SiT, M.Sc
NIP. 19770328 200012 1 001

LAMPIRAN IV
E-DALEV TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan Bidang Urusan/ Fungsionalisasi Daerah/ Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Output/Keluaran/ Kegiatan/ Output	Tahun 1						Tahun 2						Tahun 3						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang dijabarkan (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)									
			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dijabarkan (2025)		Sumber Dana		Faktor Pendukung		Faktor Penghambat		Sumber Dana		Faktor Pendukung		Faktor Penghambat		Sumber Dana		Faktor Pendukung		Faktor Penghambat		K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			K	Rp	Sumber Dana (1)	K (1)	Rp (1)			Sumber Dana (2)	K (2)	Rp (2)			Sumber Dana (3)	K (3)	Rp (3)			Sumber Dana (4)	K (4)	Rp (4)			K	Rp	K	Rp						
Rata-rata capaian kinerja (%)																										100	97,02							
Praktik Kinerja																										87	87							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN BARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 1)																										100	98,38							
Praktik Kinerja																										82	87							
3	15	3	PROGRAM PENYELENDERAAN LALU LINTAS DAN ANOKUTAN JALAN (LJAJ)		56.452,151,625		2.645,194,266								20.285,674,875													5.612,920,817	55,090,266,033	106,864,873,322	100	97,59		
					93 %		13,25								11,28													11,83	47,28		89,34			
					Terdapat Kondisi Ideal Kondisi/Isolasi Dasar	0,58 Rasio	6,58								6,58													0,58	6,58		100			
					Persentase Kelengkapan jalan yang terencana	40 %	8								10													20,08	40,69		100,23			
					Persiapan Perlongkaran Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		47.669,799,949		2,149,523,925							18.454,415,999													2.206,109,207	47,027,603,673	92,213,455,273	100	99,85	
					Jumlah Perlongkaran Jalan Terencana	7 Unit		2							2													1	7		100			
					Pembangunan Persewaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		16.430,000		PAD							PAD												PAD	26,921,809	48,773,000	48,773,000	100	63,81	
					Jumlah Persewaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terencana	1 Unit		0								1																100		
					Anggaran Yang Maksimal/Dana Yang Tidak																											100		
					Ketersediaan anggaran/SDM/Cuaca																											100		
					Penilaian Yang Maksimal, Regulasi Yang Tidak, Kebijakan Tim Yang Tidak																											100		
					Penilaian Yang Tidak Maksimal, Cara Yang Tidak Mendukung																											100		
					tidak di dibuang anggaran																											100		
					selays realisasiasi																											100		
					perencanaan																											100		
					sdays realisasiasi																											100		
					Persiapan Perlongkaran Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		42.313,609,642		PAD							PAD													PAD	1,343,370,765	43,329,465,236	96,881,613,997	100	99,99
					Jumlah Perlongkaran Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terencana	7 Unit		2								2																	100	
					Ketersediaan Anggaran Yang Maksimal,Perencanaan Dan Pengawasan Yang Baik,Sumber Daya Yang Lengkap																											100		
					Ketersediaan Anggaran																											100		
					Ketersediaan Anggaran Yang Maksimal,Perencanaan Dan Pengawasan Yang Baik, Penilaian Yang Maksimal, SDM Yang Berkualitas																												100	
					Ketersediaan Anggaran,Kemangnya Ketersediaan Sumber Dan Prasarana																												100	
					tidak ada																											100		
					dibuang oleh anggaran																											100		
					tidak ada																											100		
					dibuang oleh anggaran,Perencanaan, Pengadaan, Pemasangan,Umil/asiasi																											100		
					tidak ada																											100		
					7																											100		
					300,000,000		PAD									PAD													PAD	279,796,322	499,148,178	499,148,178	100	99,63
					Jumlah Persewaan Jalan yang Terhablitas dan Diperbaiki	1 Unit																											100	
					Perencanaan,Monitoring Dan Evaluasi																												100	
					Kemangnya SDM,Kemangnya Rasio																												100	
					anggaran yg memadai																												100	
					tidak ada																												100	
					dibuang oleh anggaran																												100	
					tidak ada																												100	
					1.209,170,967		PAD									PAD													PAD	653,634,746	3.091,266,668	3.090,921,498	100	98,71
					Rehabilitasi dan Perawatan Perlongkaran Jalan																												100	
					Jumlah Perlongkaran Jalan yang Rehabilitasi dan Diperbaiki	7 Unit																												100
					Anggaran Yang Maksimal																												100	
					Anggaran Yang Tidak Maksimal																												100	
					anggaran yg memadai																												100	
					tidak ada																												100	
					dibuang oleh anggaran																												100	
					tidak ada																												100	
					7																												100	
					dibuang oleh anggaran																												100	
					tidak ada																												100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																										100	99,85							
Praktik Kinerja																										87	87							
2	15	2	Pengelolaan Terminal Pemasangan Tap-C		160,000,000		0																										100	9
					Jumlah terminal tipe C terhablitas	1 Unit		0																									0	
					Rehabilitasi dan Perawatan Terminal Tipe C (Terdapat Urusan dan Pemasangan)																												0	
					Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Urusan dan Pemasangan) yang terhablitas dan diperbaiki	1 Unit																											0	
					Keangyaan Yang Maksimal																												0	
					Anggaran Yang Tidak Maksimal																												0	
					Kepuasan Dimasukkan																												0	
					Anggaran Yang Maksimal																												0	
					Anggaran Yang Tidak Maksimal																												0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																										100	0							
Praktik Kinerja																										87								

Kode Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prangkat Daerah/ Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output/ Outcome/ Program/ Kegiatan/ Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg direvisi (2025)						Tahun 1						Tahun 2						Tahun 3						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang direvisi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun 2025 (Aktor Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)				
			K	Rp	Sumber Dana (1)	K (2)	Rp (3)	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Sumber Dana (1)	K (2)	Rp (3)	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Sumber Dana (1)	K (2)	Rp (3)	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Sumber Dana (4)	K (4)	Rp (4)	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																															K	Rp	K	Rp	K
2	15	2	2.09	Y	Jumlah laporan 121 Perik terhadap Unit Pelaksana 121 Berhala Komandan Berhala	4 Laporan						SDM yang baik	Personel kurang				SDM yang memadai	Kurang nya personel				1			1			1			1			100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																												100	98,01						
Prediksi Kinerja																												87	87						
2	15	2	2.09		Penyusunan Anggaran Urusan untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		90,143,000			0						36,385,942						32,998,686							87,591,116		100	97,13			
2	15	2	2.09		Jumlah laporan angkutan barang yang terakumulasi	4 Laporan				1												1						4			100				
2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Urusan untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		90,181,000	PAD		0						36,385,900						32,998,686							87,591,116		100	97,13			
2	15	3	2.09	2	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Urusan untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan				1		diabawahi anggaran yang memadai dan SDM yang berkolaborasi baik	Tidak berkesesuaian operasional, budget bukan optimal				Keterbatasan Anggaran Yang Memadai, Komposisi/Komposisi Yang Baik Dengan Pihak Terkait	Utawa Yang Tidak Mendukung, Komposisi Anggaran Yang Tidak Memadai				1							1			100			
2	15	3	2.09	3	Penyusunan Anggaran Urusan untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		90,362,500	PAD		0																			0			100	0		
2	15	3	2.09	3	Jumlah Akumulasi Anggaran Urusan untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terakumulasi	15 Unit						anggaran tidak sesuai	anggaran tidak sesuai				Infrastruktur, Sarana, Regulasi	Infrastruktur, Operasional, Efisiensi, Kebijakan										0			5				
Rata-rata capaian kinerja (%)																												100	97,83						
Prediksi Kinerja																												87	87						
2	15	3	2.11		Peningkatan Rencana Urusan Jaringan Trayek Parkir dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		113,369,623			2,540,000						73,220,623						5,411,856							111,472,475		100	98,27			
2	15	3	2.11		Jumlah dokumen perencanaan rencana urusan jaringan trayek parkir	1 Dokumen				1												1						1			100				
2	15	3	2.11	2	Peningkatan Kinerja dan Efisiensi Rencana Urusan Jaringan Trayek Parkir dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		113,369,623	PAD		2,540,000						73,220,623						5,411,856							111,472,475		100	98,27			
2	15	3	2.11	2	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebijakan dan Tindakan/andanya Rencana Urusan Jaringan Trayek Parkir dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen				1		anggaran yang memadai dan SDM yang berkolaborasi dengan baik	anggaran will baik				Anggaran Yang Memadai Dan SDM Yang Berkolaborasi	anggaran Will Tidak Stabil				1						1			100				
2	15	3	2.11	3	Peningkatan Rencana Urusan Jaringan Trayek Parkir dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		194,843,000	PAD		0																			0			100	0		
2	15	3	2.11	3	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Urusan Jaringan Trayek Parkir dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen						Ekspansi dan anggaran tidak dilaksanakan karena anggaran diperlukan untuk kegiatan lainnya yang lebih penting	Ekspansi dan anggaran tidak dilaksanakan karena anggaran diperlukan untuk kegiatan lainnya yang lebih penting				Kebutuhan Anggaran, Tingkat Pelaksanaan, Jumlah Pelaksana Anggaran	Ketersediaan Anggaran, Kebutuhan Tahun										0			0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																												100	98,27						
Prediksi Kinerja																												87	87						
2	15	3	2.14		Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Urusan dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		733,533,500			8,804,871						88,106,751						7,199,820							120,781,833		100	99,11			
2	15	3	2.14		Jumlah laporan pemeliharaan dan pengembangannya angkutan orang	4 Laporan				1												1						4			100				

Evaluasi RKPD Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Paragraf Bauran Output/Bidang Urusan Pembentukan Struktur Barev Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Output/ Output)	Tipe Kinerja dan Anggaran RKPD Masa Tahun Berjalan (g Alokasi 2025)			Tipe 1			Tipe 2			Tipe 3			Tipe 4			Indikator Capaian Struktur dan Anggaran RKPD Masa yang Berjalan (2025)		Tipe 1 Anggaran RPJMD Kota 24 Tahun 2025 (Alokasi Tahun Pelaksanaan RPJMD tahun 2025)		Tipe 2 Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)																												
			K	Rp		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Number Data (1)	K (2)	Rp (3)	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Number Data (1)	K (2)	Rp (3)	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Number Data (1)	K (2)	Rp (3)	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	K	Rp	K	Rp																								
2 15 5		Jumlah Dukungan Bilang Persempangan Ternate	0	0																																														
2 15 5 2.01	Pengujian Rencana Kerja Pengembangan		747.213.000					0						0									747.632.907	100	0																									
2 15 5 2.01		Jumlah layanan perkembangan perantara citraan tidak perkembangan	0	0				0						0											100																									
2 15 5 2.01 1	Pelaksanaan Program Kerangka Kerja Pengembangan		748.114.000	PAD				0						0										747.492.900	100	0																								
2 15 5 2.01 1		Jumlah Dukungan Layanan Tidak Perkembangan	0	0										0											100																									
Batas-batas capaian kinerja (PK)																																																		
Predikat Kinerja																																																		
TOTAL BATA-BATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN BARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 5)																																																		
Predikat Kinerja																																																		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																								0		14.147.565.509				0		33.450.217.448				0		40.765.195.933			0		21.335.017.445				111.663.419.502			
TOTAL BATA-BATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN BARI SELURUH PROGRAM																																																		
PREDIKAT KINERJA BARI SELURUH PROGRAM																																																		
Faktor Pendukung Keterlaksanaan Performansi																																																		
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																																		
Tidak Lunas Yang Diwajibkan dalam RKPD dilaksanakan berdasarkan																																																		
Tidak Lunas Yang Diwajibkan dalam RPJMD dilaksanakan berdasarkan																																																		

Samarinda, 26-02-2025
Mengotahai
Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda

HMT MANALI U. S. ST. T. M. Sg
NIP. 197703252000121001



LAMPIRAN V
DOKUMENTASI KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

DOKUMENTASI KEGIATAN

KEGIATAN ANGKUTAN



KEGIATAN ABDI YASA



KEGIATAN SALUD (Sadar Lalu Lintas Usia Dini)



KEGIATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



KEGIATAN SARANA PRASARANA



KEGIATAN LALU LINTAS DAN PERPARKIRAN

